

PROFIL KEPENDUDUKAN 2026

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BULUNGAN
BISA!
BERDAULAT - INKLUSIF - SINERGI - ADAPTIF



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bulungan tahun 2026.

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bulungan tahun 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran keadaan kependudukan Kabupaten Bulungan dalam kurun waktu tahun 2025, dan diharapkan pula agar dapat menjadi sumber data bagi yang membutuhkan dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Pengambilan Kebijakan secara umum untuk Kabupaten Bulungan khususnya mengenai gambaran tentang kondidi kependudukan di Kabupaten Bulungan yang meliputi kuantitas, kualitas, mobilitas dan persebaran penduduk melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bulungan tahun 2026 masih terdapat kekurangan dan kelemahan baik dalam data maupun Bahasa, maka kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang positif untuk kesempurnaan penyusunan pada waktu yang akan datang.

Tanjung Selor, Maret 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan



H. Jamaluddin Saleh, S.Pd
NIP.196807261997021004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR/GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I - 1
B. Peraturan Perundangan	I - 2
C. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat	I - 3
D. Ruang Lingkup	I - 4
E. Pengertian Umum / Daftar Istilah Kependudukan	I - 5
BAB II KONDISI UMUM KABUPATEN BULUNGAN	
A. Letak Geografis	II - 1
B. Kondisi Topografi	II - 2
C. Kondisi Iklim	II - 5
D. Profil Kecamatan	II - 5
BAB III KUANTITAS PENDUDUK	
A. Persebaran (Distribusi) Penduduk	III - 1
B. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi	III - 9
C. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	III - 18
BAB IV KUALITAS PENDUDUK	
A. Kesehatan	IV - 1
B. Pendidikan	IV - 5
C. Perekonomian	IV - 6
D. Sosial	IV - 10
BAB V KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	
A. Kepemilikan Kartu Keluarga	V - 1
B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik(KTP-EI)	V - 2
C. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	V - 4
D. Kepemilikan Akta	V - 6
BAB VI PENUTUP	
Penutup	VI - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Topografi Wilayah	II - 3
Tabel 2.2.	Klarifikasi Lereng	II - 3
Tabel 3.1.	Jumlah Penduduk per Kecamatan	III - 2
Tabel 3.2.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas	III - 4
Tabel 3.3.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Barat	III - 4
Tabel 3.4.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Utara	III - 4
Tabel 3.5.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Timur	III - 4
Tabel 3.6.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Selor	III - 5
Tabel 3.7.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Tengah	III - 5
Tabel 3.8.	Jumlah Penduduk Kecamatan Peso	III - 5
Tabel 3.9.	Jumlah Penduduk Kecamatan Peso Hilir	III - 6
Tabel 3.10.	Jumlah Penduduk Kecamatan Sekatak	III - 6
Tabel 3.11.	Jumlah Penduduk Kecamatan Bunyu	III - 7
Tabel 3.12.	Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019-2023	III - 9
Tabel 3.13.	Jumlah Penduduk Menurut Umur	III - 10
Tabel 3.14.	Jumlah Penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin	III - 12
Tabel 3.15.	Rasio Ketergantungan	III - 16
Tabel 3.16.	Rasio Status Perkawinan	III - 17
Tabel 3.17.	Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir	III - 19
Tabel 3.18.	Jumlah Pemeluk Agama / Kepercayaan	III - 20
Tabel 3.19.	Jumlah Rata-rata Anggota Keluarga	III - 23
Tabel 4.1.	Angka Kelahiran Menurut Usia	IV - 3
Tabel 4.2.	Rasio Anak dan Perempuan	IV - 4
Tabel 4.3.	Latar Belakang Pendidikan Terakhir	IV - 5
Tabel 4.4.	Jenis Pekerjaan Penduduk	IV - 6
Tabel 4.5.	Jumlah Angka Pengangguran	IV - 8
Tabel 4.6.	Jumlah Rasio Ketergantungan	IV - 9
Tabel 4.7.	Angka Penyandang Cacat (Disabilitas)	IV - 10
Tabel 5.1.	Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga	V - 2
Tabel 5.2.	Presentase Kepemilikan KTP-EI	V - 3
Tabel 5.3.	Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	V - 4
Tabel 5.4.	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran	V - 6
Tabel 5.5.	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18) Tahun	V - 7
Tabel 5.6.	Presentase Kepemilikan Akta Perkawinan	V - 9
Tabel 5.7.	Presentase Kepemilikan Akta Perceraian	V - 11
Tabel 5.8.	Presentase Kepemilikan Akta Kematian	V - 13

DAFTAR GAMBAR / GRAFIK

Gambar 2.1	Peta Kabupaten Bulungan	II - 2
Grafik 3.1.	Jumlah Penduduk	III - 3
Grafik 3.2.	Rasio Kepadatan Penduduk	III - 8
Grafik 3.3.	Rasio Jenis Kelamin	III - 13
Grafik 3.4.	Piramida Penduduk Menurut Umur	III - 14
Grafik 3.5.	Rasio Status Perkawinan	III - 18
Grafik 3.6.	Jumlah Pemeluk Agama / Kepercayaan	III - 21
Grafik 3.7.	Jumlah Rata-rata Anggota Keluarga.....	III - 24
Grafik 4.1.	Angka Kelahiran Menurut Usia	IV - 3
Grafik 4.2.	Rasio Anak dan Perempuan	IV - 5
Grafik 5.1.	Presentase Kepemilikan KTP-El	V - 4
Grafik 5.2.	Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	V - 5
Grafik 5.3.	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran	V - 7
Grafik 5.4.	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18) Tahun	V - 8
Grafik 5.5.	Presentase Kepemilikan Akta Perkawinan	V - 10
Grafik 5.6.	Presentase Kepemilikan Akta Perceraian	V - 12



A. Latar Belakang

Bahwa kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup/sumber daya alam pada masing-masing kabupaten/kota terbentuk dari hasil proses pembangunan yang telah dilaksanakan selama tiga dekade yang lalu secara sistematis dan berkelanjutan dalam sistem sentralistik. Dalam rangka menunjang peningkatan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan

di tingkat kabupaten/kota belum secara tuntas mengatasi permasalahan kependudukan dan tindakan yang dilakukan masih bersifat reaktif dan cenderung normatif.

Demikian halnya dalam era otonomi daerah diharapkan terjadi pergeseran paradigma dimana pola-pola pembangunan yang bersifat mobilisasi kehendak pemerintah kearah pola pembangunan parsitipatif dengan perencanaan yang bersifat "bottom up". Pola pembangunan yang demikian dikenal dengan istilah pembangunan berwawasan kependudukan. Penyusunan analisis kependudukan dimaksud sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi dan mengendalikan kependudukan sejak dini yang ditimbulkan oleh adanya perubahan sistem penduduk yang akan terjadi dikemudian hari. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun perencanaan dan menetapkan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan agar pembangunan di bidang kependudukan juga dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang bertujuan menyediakan data dan informasi kependudukan skala nasional, provinsi dan kota/kabupaten, dan dapat dijadikan acuan dasar bagi sektor atau lembaga-lembaga lain (pemerintah maupun swasta) dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi maka Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bulungan Tahun 2026.

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Bulungan Tahun 2026 ini adalah usaha untuk menyediakan data kependudukan yang valid, yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan didalam basis data kependudukan, serta dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan di Kabupaten Bulungan maupun pemerintah pusat.

Variabel data yang disajikan disini adalah hasil registrasi kependudukan di tiap-tiap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota. Variabel-variabel tersebut meliputi kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, dan kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan.

B. Peraturan Perundangan

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

- 
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 112 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 695).
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ Tahun 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.

C. Tujuan, Sasaran dan Manfaat

I. Tujuan

Analisis kependudukan ini ditujukan untuk memberi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang hasilnya akan dijadikan masukan dalam Perencanaan Pelaksanaan dan Evaluasi Pemerintah Daerah.

II. Sasaran

Sasaran dari penyusunan analisis kependudukan adalah:

- a. Tersusunnya hasil perkembangan penduduk terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup di suatu wilayah (Kabupaten/Kota).

- b. Terumuskannya bahan masukan untuk perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mencegah dan mengendalikan masalah kependudukan.

III. Manfaat

Manfaat disusunnya analisis kependudukan adalah untuk mengantisipasi sejak dini masalah kependudukan yang akan datang.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penyusunan profil perkembangan kependudukan ini mencakup lima hal pokok yaitu antara lain:

- 1) Menyajikan perkembangan kependudukan secara kuantitatif sehingga tampak jelas apa yang sudah berlangsung;
- 2) Mengidentifikasi kelompok atau segmen kependudukan yang membutuhkan perhatian khusus dan upaya-upaya yang diperlukan sehingga mendapat pelayanan tepat sasaran;
- 3) Dari point 1) dan 2) teridentifikasi potensi penduduk yang dapat dijadikan aset pembangunan daerah dan nasional;
- 4) Mengkoordinasikan, melakukan evaluasi dengan instansi terkait untuk memperoleh kesepakatan dan kesepakatan dalam penyusunan dan pemanfaatannya;
- 5) Mendorong percepatan terwujudnya satu data kependudukan untuk analisa pembangunan daerah.

Buku Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Bulungan Tahun 2019 ini secara garis besar menyajikan data sebagai berikut:

- A. Persebaran (Distribusi) Penduduk
- B. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi
- C. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
- D. Kualitas Penduduk : Kesehatan, Pendidikan, Perekonomian, Angka Pengangguran
- E. Kepemilikan Dokumen Kependudukan
 1. Kepemilikan Kartu Keluarga
 2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

3. Kepemilikan Akta : Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian

E. Pengertian Umum / Daftar Istilah Kependudukan

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
3. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hal lainnya untuk pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor;
4. **Data Kependudukan** adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. **Perkembangan Kependudukan** adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup;
6. **Kuantitas Penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal;
7. **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan bermartabat;
8. **Mobilitas Penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi;
9. **Profil Perkembangan Kependudukan** adalah kumpulan data dan informasi tentang perkembangan kependudukan dalam bentuk tertulis, yang mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang

meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup;

10. **Persebaran Penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan;
11. **Peristiwa Kependudukan** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan;
12. **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
13. **Kematian atau Mortalitas** menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup;
14. **Rasio Jenis Kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu;
15. **Penduduk Musiman** merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domisilinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang;
16. **Mobilitas Penduduk Pulang-Balik atau Pulang-Pergi (commuting)** adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama;
17. **Penduduk Usia Kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;
18. **Penduduk yang Termasuk Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha;
19. **Penduduk yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan pensiun;
20. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk dan disampaikan penduduk sebagai pekerjaannya pada saat melaporkan biodatanya kepada

petugas registrasi penduduk di kelurahan/desa/dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

21. **Angka Partisipasi Angkatan Kerja** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
22. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tertinggi, termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah;
23. **Mengurus Rumah Tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya : ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu rumah tangga; sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapat upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja;
24. **Kegiatan lainnya** adalah mereka yang melakukan suatu pekerjaan diluar jenis pekerjaannya yang telah ditetapkan;
25. **Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah);
26. **Jenis Pekerjaan** adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh penduduk;
27. **Status Pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan;
28. **Pengangguran** adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/survey atau sensus tidak bekerja dan sedang mencari kerja;
29. **Angka Pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja;
30. **Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas;
31. **Lahir Hidup** adalah
 - a. suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusat atau gerakan otot;

- b. banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya;
32. **Lahir mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan;
33. **Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)** adalah rata-rata banyaknya anak yang akan dimiliki seseorang wanita pada masa reproduksinya jika ia mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung;
34. **Kematian atau Mortalitas** menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup;
35. **Angka Partisipasi Total** adalah proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah yaitu umur 7-12,13-15,16-18, dan 19-24 tahun;
36. **Angka Pertumbuhan Penduduk** adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya;
37. **Proporsi Penduduk** adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu, seperti umur dan jenis kelamin;
38. **Rasio Jenis Kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan;
39. **Piramida Penduduk** adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik berbentuk piramida;
40. **Rasio Kepadatan Penduduk** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau beberapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu;

KONDISI UMUM KABUPATEN BULUNGAN

Sebelum membahas berbagai hal terkait profil kependudukan perlu dipahami secara umum tentang Kabupaten Bulungan. Tidak hanya uraian letak geografis daerah tetapi juga menyangkut kondisi demografis daerah, gambaran ekonomi dan potensi daerah. Uraian itu diharapkan dapat memberikan gambaran latar belakang Kabupaten bulungan sebelum membahas ihwal kependudukan.

A. Letak Geografis

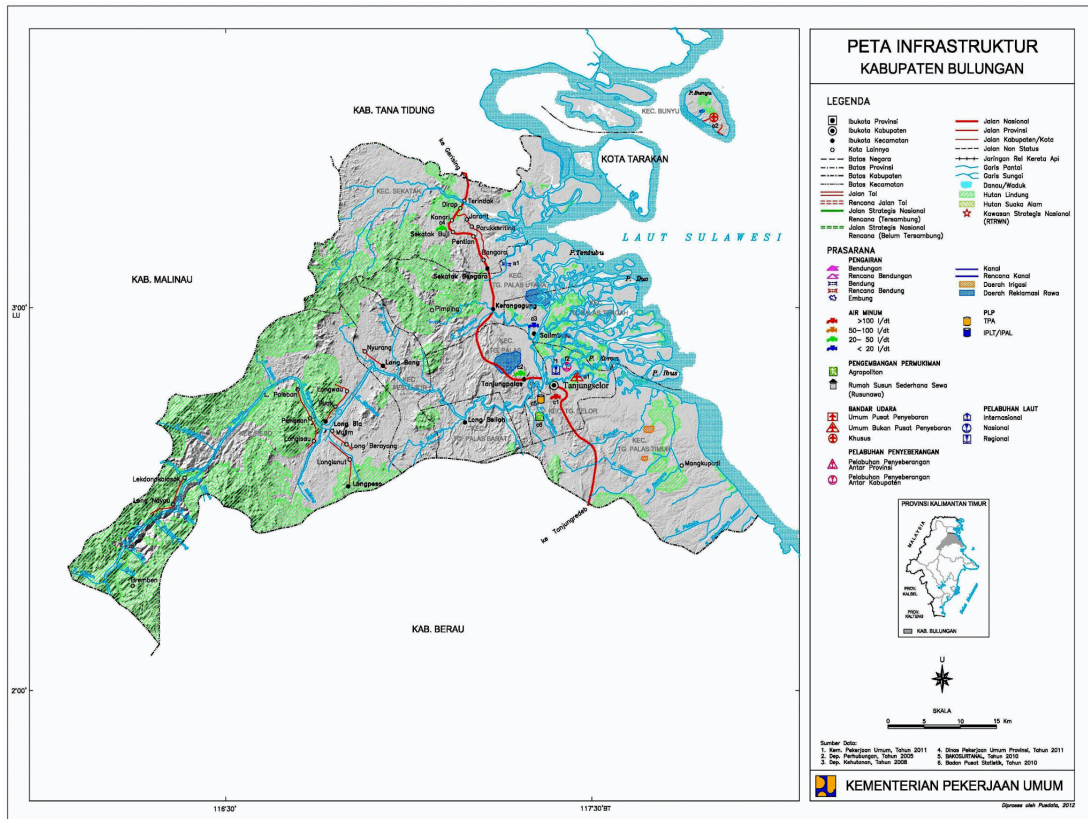
Kabupaten Bulungan sebagai salah satu kabupaten di bagian utara pulau Kalimantan, mempunyai luas 18.010,50 Km² terletak antara 116⁰04'41" sampai dengan 117⁰57'56" Bujur Timur dan 2⁰09'19" sampai dengan 3⁰34'49" Lintang utara. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten tanah Tidung di Propinsi Kalimantan Utara maka luas Kabupaten Bulungan berkurang menjadi 13.181,92 km². Adapun batas-batas kabupaten Bulungan; Sebelah utara dengan Kabupaten tana Tidung dan kabupaten Nunukan, sebelah Timur dengan Laut sulawesi dan kota tarakan , sebelah Selatan dengan Kabupaten Berau sebelah Barat dengan kabupaten malinau.

Kondisi Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbukit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam.

Bentuk wilayah datar hanya dijumpai disebagian besar wilayah sepanjang garis pantai atau sepanjang daerah aliran sungai atau pada daerah

Gambar 2.1. Peta Kabupaten Bulungan



dengan fisiografi dataran alluvial sungai berupa tanggul dan rawa dengan kemiringan lahan kurang dari 2 persen. Adapun pulau yang terluas adalah pulau mandul di kecamatan Bunyu (38.737,413 ha) dan sungai yang terpanjang adalah sungai kayan (576 km: termasuk yang berada di wilayah kabupaten Malinau dan kabupaten tanah Tidung) sedangkan gunung yang tertinggi adalah gunung Kundas yang berada di Kecamatan Peso dengan ketinggian 1.670m.

B. Kondisi Topografi

Topografi adalah perbedaan tinggi atau bentuk wilayah suatu daerah, termasuk didalamnya perbedaan kemiringan lereng, panjang lereng, bentuk lereng, dan posisi lereng. Topografi dalam proses pembentukan tanah mempengaruhi : 1) jumlah air hujan yang meresap atau ditahan oleh tanah; 2) dalamnya air tanah; 3) besarnya erosi; 4) arah gerakan air berikut bahan terlarut di dalamnya dari satu tempat ke tempat lain. Topografi juga merupakan istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan studi terperinci tentang permukaan bumi, termasuk perubahan pada permukaan seperti pegunungan dan lembah serta fitur lainnya seperti sungai dan jalan. Kondisi topografi adalah elemen dasar suatu

wilayah untuk mengetahui karakter fisik suatu daerah. Karakteristik fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan air laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi di suatu daerah

Tabel 2.1: Topografi Wilayah

No	Kabupaten	Kelas Ketinggian					
		0-7 m	7-25 m	25-100 m	100-500 m	500-1000 m	>1000m
1	Bulungan	213.561	249.257	220.119	531.364	193.172	273.749

(Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir sepertiga total luas wilayah Kabupaten Bulungan memiliki ketinggian antara 100-500 mdpl (31,21%), hanya sekitar 5,92% yang memiliki kelas ketinggian 500-1000 mdpl. Perkembangan pembangunan diperkirakan akan mengelompok di wilayah yang memiliki ketinggian relatif lebih landai, sedangkan wilayah pegunungan di Kabupaten Bulungan dapat dijadikan kawasan lindung dan recharge area (daerah resapan air).

Table 2.2: Klasifikasi Lereng

No	Kabupaten	Kelas Lereng/Kemiringan				Jumlah (Ha)
		0-2% (Datar)	2-15% (Sangat Landai/ Bergelombang)	15-40% (Agak Curam)	>40% (Sangat Curam)	
1	Bulungan	319.440	185.018	216.359	590.017	1.310.834

(Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020)

Suatu permukaan tanah yang miring dengan sudut tertentu terhadap bidang horizontal disebut sebagai lereng. Lereng ini dapat terjadi secara alamiah atau buatan. Kemiringan lereng menunjukkan besarnya sudut lereng dalam persen atau derajat. Dua titik yang berjarak horizontal 100 meter yang mempunyai selisih tinggi 10 meter membentuk lereng 10 persen. Kecuraman lereng 100 persen setara dengan kecuraman 45 derajat.

Kondisi topografi Kabupaten Bulungan didominasi oleh kemiringan lereng di atas 40%, khususnya wilayah bagian tengah dan barat yang sebagian besar merupakan hulu sungai. Pegunungan atau perbukitan yang tersebar di Kabupaten Bulungan yaitu sebagai

berikut :Gunung/Bukit Brun, Ubut Lebung, Sombang, Bekayan, Sondong, Gunung Putih, Mara, Sekatak, Kelu, Kundas, Setarat, Takin, Silid, Rian, Aung, Jatu;

Pembangunan di atas tanah lereng memiliki resiko tinggi terhadap bahaya longsor. Faktor yang harus diperhatikan dalam menghindari kelongsoran adalah kemiringan lereng itu sendiri. Selain itu, pemilihan bentuk dan dimensi pondasi juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan guna memperoleh daya dukung yang diinginkan. Secara umum, ada beberapa jenis longsor yang sering terjadi di Indonesia, yaitu:

1. Longsoran Translasi: Bergeraknya material tanah pada kondisi tanah yang bertopografi rata atau menggelombang landai.
2. Longsoran Rotasi: merupakan pergerakan material tanah yang terjadi di dalam bidang yang berbentuk cekung sehingga seringkali terjadi perputaran atau rotasi di dalam bidang cekung tersebut.
3. Pergerakan Blok: merupakan pergerakan batuan yang ada di dalam tanah pada bidang yang datar atau landai. Kondisi ini juga seringkali dinamakan dengan longsoran blok batu dengan jumlah batu yang biasanya masif.
4. Runtuhan Batu: merupakan kondisi dimana terjadi runtuh batu secara langsung dan terjun bebas dari atas ke bawah. Hal ini biasanya terjadi pada bukit yang terjal dengan lereng yang cukup curam dan ini sering ditemukan di tebing pantai.
5. Rayapan Tanah: terjadi karena adanya rayapan atau pergerakan tanah yang sangat lambat dan halus. Ini biasanya terjadi pada tanah yang memiliki butiran kecil halus dan namun memiliki struktur yang cukup kasar. Biasanya jenis tanah longsor ini hampir tidak bisa dikenali dan kalau longsor sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama baru bisa dikenali dengan miringnya tiang-tiang listrik, rumah dan lainnya yang berada di atasnya.
6. Aliran Bahan Rombakan: terjadi karena adanya pergerakan tanah dan materialnya yang disebabkan oleh dorongan air yang sangat kuat. Kecepatan dari aliran air sendiri akan sangat tergantung pada kemiringan lereng, volume air, tekanan air, kecepatan air serta jenis material tanahnya itu sendiri apakah mudah terangkut oleh air atau tidak. Gerakan dari tanah longsor ini lumayan cepat dan bisa mencapai seluruh lembah dengan jarak ratusan meter jauhnya.

C. Kondisi Iklim

Iklim adalah keadaan cuaca suatu wilayah dalam jangka waktu yang panjang, biasanya 11-30 tahun. Indonesia secara keseluruhan dikelilingi oleh Samudra dan Lautan, sehingga memiliki iklim tropis basah. Secara umum, kondisi iklim Kabupaten Bulungan hampir sama dengan wilayah lain di Indonesia yaitu beriklim tropis, dengan ciri-ciri: (1) Setiap tahunnya suhu udara akan cukup tinggi, karena memperoleh sinar matahari yang cenderung vertikal; (2) Suhu udara rata-rata tidak kurang dari 18 derajat celcius bahkan sampai 27 derajat celcius. Saat mengalami musim hujan dan musim kemarau pun tidak memiliki perbedaan berarti. (3) Dalam setiap pergantian hari adalah 24 jam dimana siang dan malam hari masing-masing memiliki waktu selama 12 jam; (4) Wilayah iklim tropis basah membuat suatu wilayah ditumbuhi banyak tanaman hijau yang lebat. Wilayah ini mampu mempengaruhi perubahan iklim yang sangat signifikan.

Kondisi iklim suatu wilayah berpengaruh pada aspek sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat setempat, sehingga corak kehidupan tiap wilayah juga pasti akan berbeda. Di bidang agraris (pertanian dan perkebunan), iklim berpengaruh signifikan terhadap pola pekerjaan pada bidang ini. Banyak petani dan pekebun di Bulungan yang mengandalkan iklim dalam bercocok tanam, misalnya tanaman yang cocok ditanam oleh petani/pekebun di musim hujan adalah padi, sawi, kubis, caisim, bayam, kangkung, terong, kacang panjang, timun, semangka, melon. Mereka biasanya juga memperhitungkan bulan jatuhnya panen agar tepat waktu. Tanaman yang cocok ditanam saat musim kemarau adalah jagung, ubi, ketela, tomat, kentang, kacang tanah, kacang hijau, labu. Jenis tanaman umbi-umbian justru menghasilkan kualitas umbi yang baik apabila dipanen saat musim kemarau. Sedangkan tanaman yang cocok ditanam di musim pancaroba (peralihan) diantaranya adalah padi, cabai, tomat, terong, timun, semangka, melon, umbi-umbian, dan sayur-sayuran.

D. Profil Kecamatan

1. Tanjung Selor

Kecamatan Tanjung Memiliki Luas Wilayah : $\pm 1.277,81 \text{ km}^2$ Jarak dan merupakan letak Ibukota Kabupaten. Adapun batas wilayah Kecamatan Tanjung Selor adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanjung Palas Timur;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Berau;

- Sebelah Utara : Kecamatan Tanjung Palas;
- Sebelah Barat : Kecamatan Tanjung Palas;

Kondisi geografis Kecamatan Tanjung Selor sebagian besar merupakan tanah datar dan sungai-sungai. Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Tanjung Selor membawahi 3 (tiga) wilayah pemerintahan Kelurahan yaitu : Tanjung Selor Hulu, Tanjung Selor Hilir dan Tanjung Selor Timur. Membawahi pula 6 (enam) desa, meliputi : Jelarai Selor, Gunung Seriang, Bumi Rahayu, Gunung Sari, Apung dan Tengkapak.

Kecamatan Tanjung Selor adalah ibukota kabupaten dan merupakan pusat pemerintahan. Masyarakatnya sangat beragam terdiri dari berbagai suku, seperti tidung, bulungan, dayak, bugis, jawa, dan suku-suku pendatang lainnya.

Dengan keragaman suku masyarakat membuat budayanya pun juga cukup beragam, sesuai dengan keradaan suku masyarakatnya. Namun dengan keragaman itulah membuat dinamika budaya pun mengalami proses akulturasi dan saling menghormati antar budaya dan masyarakatnya.

Sarana ibadah yang ada di wilayah ini terdiri dari mesjid 29 buah, langgar/mushalla 19 buah dan gereja 21 buah, Pura 1 buah, Vihara 1 Buah, Ta Pek Kong 1 buah.

Sarana Pendidikan : 8 TK, 31 SD/MI, 1 SDLB, 11 SLTP/MTs, 7 SLTA/MA dan 3 Perguruan Tinggi.

Potensi yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Selor, adalah sebagai berikut:

- a. Kehutanan, yang masih menyimpan potensi kayu-kayu log;
- b. Sangat cocok untuk perkebunan, karena hamparan tanah datarnya cukup luas.
- c. Pertambangan minyak di daerah Apung.
- d. Sector wisata yang berada di Km-18

2. Tanjung Palas

Kecamatan Tanjung Palas memiliki Luas Wilayah : $\pm 1.755,74 \text{ km}^2$ dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : $\pm 2 \text{ km}$, Adapun batas wilayah Kecamatan Tanjung Palas adalah sebagai berikut:

- e. Sebelah Timur : Kecamatan Tanjung Selor;
- f. Sebelah Selatan : Kabupaten Berau;

g. Sebelah Utara : Kecamatan Tanjung Palas Utara dan Tanjung Palas Tengah;

h. Sebelah Barat : Kecamatan Tanjung Palas Barat;

Kondisi geografis Kecamatan Tanjung Palas sebagian besar merupakan tanah datar, bukit dan sungai-sungai. Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Tanjung Palas membawahi 4 (empat) Kelurahan yaitu Tanjung Palas Hulu, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Hilir dan Karang Anyar serta 5 (lima) pemerintahan desa meliputi : Gunung Putih, Antutan, Pejalín, Teras Nawang dan Teras Baru. Masyarakatnya sangat beragam terdiri dari berbagai suku, seperti tidung, bulungan, dayak, bugis, jawa, dan suku-suku pendatang lainnya.

Potensi wisata maupun alam yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Palas, adalah sebagai berikut:

- Wisata Alam Gunung Putih
- Musium Kesultanan Bulungan
- Wisata Budaya Adat Dayak Kenyah.
- Kehutanan, yang masih menyimpan potensi kayu-kayu log;
- Sangat cocok untuk perkebunan, karena hamparan tanah datarnya cukup luas.

3. Tanjung Palas Tengah

Kecamatan Tanjung Palas Tengah memiliki Luas Wilayah : $\pm 624,95 \text{ km}^2$ dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : $\pm 50 \text{ km}$, Adapun batas wilayah Kecamatan Tanjung Palas Tengah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Tarakan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Tg. Palas Timur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Palas Utara dan Sekatak;

Sementara keadaan topografis wilayah sebagian besar datar berombak mencapai 90 % dan sebagian kecilnya berbukit mencapai 10 %.

Akses dari ibukota kecamatan ke Desa-desa yang ada sebagian bisa dicapai melalui darat seperti desa Salimbatu dengan waktu tempuh 15 menit dan Silva Rahayu (1 jam), sedangkan Desa Tanjung Buka hanya bisa ditempuh melalui jalur sungai yang

waktu tempuhnya sekitar 1 jam menggunakan perahu long boat, ketinting dan speedboat.

Sebagai salah satu Kecamatan yang baru dimekarkan dari Kecamatan induk Tanjung Palas, jumlah desanya sebanyak 3 (tiga) Desa, yaitu: Desa Salimbatu, Desa Tanjung Buka, dan Desa Silva Rahayu.

Kecamatan Tanjung Palas Tengah merupakan salah satu daerah yang menjadi pemukiman transmigrasi. Sebagai tempat pemukiman transmigrasi membuat masyarakatnya pun cukup beragam terdiri dari berbagai suku, seperti tidung, bulungan, dayak, bugis, jawa dan timor.

Sesuai dengan keadaan topografi dan potensi wilayahnya, sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan tradisional. Dengan keragaman suku masyarakat membuat budayanya pun juga cukup beragam, sesuai dengan keradaan suku masyarakatnya. Namun dengan keragaman itulah membuat dinamika budaya pun mengalami proses akulturasi dan saling menghormati antar budaya dan masyarakatnya.

Komoditi Khas dari Kecamatan Tanjung Palas Tengah:

- Perikanan, meliputi : ikan dan udang ekspor, ikan kering dan ebi (Desa Tanjung Buka)
- Pertanian : padi sawah (Desa salimbatu dan Desa Silva Rahayu)

Potensi wisata maupun alam yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Tengah, adalah sebagai berikut:

- Wisata Agama : Kuburan Keramat Bilfaqih dan Al Jufri
- Wisata Sejarah : Kuburan Datu Adil
- Perkebunan kelapa sawit,
- Pertambangan Batu bara
- Pertambakan

4. Tanjung Palas Timur

Kecamatan Tanjung Palas Timur memiliki Luas Wilayah : 677,77 km² dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : ± 86 km², Adapun batas wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Selor/ Tanjung Palas;

- Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Berau;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Selor

Secara geografis Kecamatan Tanjung Palas Timur berada pada wilayah titik koordinat 117°30" - 118°02" bujur timur dan 02°15" - 02°50" lintang utara. Sedangkan topografinya cukup beragam, sebagian besar berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan tebing cukup terjal serta memiliki kemiringan sebagiannya cukup tajam.

Jumlah Desa seluruhnya terdiri 8 Desa, yaitu: Desa Tanah Kuning, Desa Mangkupati, Desa Sajau Pungit, Desa Wonomulyo, Desa Tanjung Agung, Desa Binai, Desa Pura Sajau, Desa Sajau Hilir.

Adapun Kecamatan Tanjung Palas Timur Merupakan salah satu daerah penghasil ikan (kering/basah), ikan teri, udang dan kelapa

Potensi SDA dan Wisata dari Kecamatan Tanjung Palas Timur meliputi:

- Wisata Alam, meliputi Pemancingan di Danau (Desa Tanjung Agung), sumber air panas (Desa Sajau), dan air terjun (Desa Pura Sajau);
- Wisata Pantai dan Bahari, antara lain : Pantai Tanah Kuning dan Pantai Mangkupati yang sangat ideal sebagai salah satu lokasi untuk pemancingan ikan laut dan sekitar Karang Tigau untuk diving.
- hutan dengan kayunya, batu bara dan minyak bumi.

5. Tanjung Palas Utara

Kecamatan Tanjung Palas Timur memiliki Luas Wilayah : 806,4 km² dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : ± 82 km², Adapun batas wilayah Kecamatan Tanjung Palas Utara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tanjung Palas dan Tanjung Palas Barat;
- Sebelah Utara : Kecamatan Sekatak;
- Sebelah Barat : Kecamatan Peso Hilir.

Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Tanjung Palas Utara membawahi 6 (enam) wilayah pemerintahan desa. Masing-masing mempunyai ciri dan memiliki

keanekaragaman struktur budaya masyarakatnya, meliputi : Karang Agung, Pimping, Panca Agung, Ruhui Rahayu, Ardi Mulyo dan Kelubir.

6. Tanjung Palas Barat

Kecamatan Tanjung Palas Barat memiliki Luas Wilayah : 2.779 km² dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : ± 82 km², Adapun batas wilayah Kecamatan Tanjung Palas Barat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kecamatan Tanjung Palas;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Berau;
- Sebelah Utara : Kecamatan Tanjung Palas Utara;
- Sebelah Barat : Kecamatan Peso Hilir.

Secara geografis wilayah Kecamatan Tanjung Palas Barat terletak pada titik koordinat diantara 117° 04' 00" – 117 ° 15' 00" Bujur Timur dan diantara 02° 25' 00" – 03 ° 10' 00" Lintang Utara.

Sementara topografi wilayahnya terdiri dari wilayah datar sampai berombak mencapai 57,28 %, berombak sampai berbukit 14,71 % dan berbukit hingga bergunung-gunung mencapai 28,01 %.

Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Tanjung Palas Barat membawahi 5 (lima) wilayah pemerintahan desa. Masing-masing mempunyai ciri dan memiliki keanekaragaman struktur budaya masyarakatnya, meliputi : Long Beluah, Long Sam, Lang Pari, Mara Satu dan Mara Hilir.

Masyarakat Kecamatan ini cukup heterogen, terdiri dari berbagai suku. Suku asli masyarakatnya adalah dayak. Heterogenitas masyarakat ini disebabkan Bhayangkara pernah menjadi pusat kegiatan perusahaan besar. Sehingga berbagai warga berdatangan untuk bekerja dan sekaligus menetap di wilayah ini. Termasuk diantaranya berasimilasi dengan penduduk setempat. Berbagai suku yang ada diantaranya dayak dengan berbagai anak sukunya, banjar, jawa, bugis, tator, minang, batak, timur dan lain-lain.

Heterogenitas ini juga mempengaruhi kehidupan beragama masyarakatnya, yang juga cukup beraneka ragam, seperti Islam, Kristen (protestan dan Katolik), Hindu, dan Budha.

Pendidikan masyarakatnya pun juga cukup berkembang, walaupun yang berasal dari penduduk asli setempat. Meskipun tidak ada sekolahnya, tetapi pada umumnya mereka mengirimkan untuk belajar ke luar daerah.

Komoditi unggulan yang menjadi kekhasan Kecamatan ini adalah Kakao. Berdasarkan struktur tanahnya sangat cocok untuk ditanami dengan tanaman jenis perkebunan ini. Dalam setiap bulannya cukup banyak dihasilkan oleh masyarakat, sebagiannya dijual ke pengumpul untuk kemudian dikirim ke Tawau.

Potensi SDA dan Wisata dari Kecamatan Tanjung Palas Barat meliputi:

- Wisata Alam Air terjun Km 17 dan perburuan
- Wisata Budaya Adat Daya Kenyah.
- Kehutanan, yang masih menyimpan potensi kayu-kayu log;
- Sangat cocok untuk perkebunan, karena hamparan tanah datarnya cukup luas.
- Pertambangan emas yang masih belum tergali.

7. Sekatak

Kecamatan Sekatak memiliki Luas Wilayah : 1.993,98 km² dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : ± 93 km², Adapun batas wilayah Kecamatan Sekatak adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kota Tarakan dan Laut Sulawesi;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tanjung Palas Utara, Peso Hilir dan Peso;
- Sebelah Utara : Kecamatan Sesayap Hilir dan Sesayap;
- Sebelah Barat : Kabupaten Malinau.

Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Sekatak membawahi 22 (dua puluh dua) wilayah pemerintahan desa. Masing-masing mempunyai ciri dan memiliki keanekaragaman struktur budaya masyarakatnya, meliputi : Pentian, Pungit, Sekatak bengara, Terindak, Anjar Arip, Kelingawan, Kriting, Ambalat, Kendari, Bunau, Sekatak Buji, Liagu, Kelising, Ujang, Tenggiling, Kelembunan, Bekiliu, Paru Abang, Bambang, Turung, Maritam dan Punan Dulau.

8. Bunyu

Kecamatan Bunyu memiliki Luas Wilayah : 198,32 km² dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : ± 60 km², Adapun batas wilayah Kecamatan Bunyu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pulau Tarakan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Baru;

Secara umum wilayah Bunyu terdiri dari daerah datar dan sebagiannya dataran tinggi dengan tingkat kemiringan sedang. Desa definitif berjumlah 3 Desa, yaitu: Desa Pulau Bunyu Selatan, Desa Pulau Bunyu Barat, dan Desa Pulau Bunyu Timur.

Masyarakat di Bunyu cukup beranekaragam, bagian terbesarnya adalah pendatang yang berasal dari Jawa maupun Sulawesi. Sedangkan suku aslinya adalah masyarakat suku Tidung, dengan klasifikasinya suku Jawa 26,85 %, Bugis 25,11 %, Tidung 11,29 %, Banjar 9,97 % dan suku lainnya 26,78 %.

Dengan keanekaragaman tersebut, maka secara budaya dan adat istiadat pun juga beragam. Masing-masing suku yang ada secara khas menampilkan budayanya masing-masing, seperti Jawa, Bugis, Banjar, Tidung maupun lainnya.

Sebagian masyarakatnya bekerja sebagai tenaga kerja/karyawan di PT Pertamina EP Bunyu dan PT Medco Methanol Bunyu, PNS, petani kebun dan bagian terbesarnya menjadi nelayan.

Potensi SDA dan Wisata dari Kecamatan Bunyu meliputi:

- Salak, ikan (basah dan kering)
- Komoditi olahan hasil pertanian dan perikanan lainnya
- Batu Bara
- Minyak dan gas
- Perikanan dan kelautan
- Pantai Nibung
- Pantai Sei Kura
- Pantai Tanjung Arang

9. Peso Hilir

Kecamatan Peso Hilir memiliki Luas Wilayah : 1.639,71 km² dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : ± 225 km², Adapun batas wilayah Kecamatan Peso Hilir adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kecamatan Tanjung Palas Barat dan Tanjung Palas Utara;

- Sebelah Selatan : Kabupaten Berau;
- Sebelah Utara : Kecamatan Sekatak;
- Sebelah Barat : Kecamatan Peso;

Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Peso Hilir membawahi 6 (enam) wilayah pemerintahan desa. Masing-masing mempunyai ciri dan memiliki keanekaragaman struktur budaya masyarakatnya, meliputi : Long Telenjau, Naha Aya, Long Bang, Long Bang Hulu, Long Tunggu dan Long Lembu.

10. Peso

Kecamatan Peso memiliki Luas Wilayah : 3.142,79 km² dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : ± 250 km², Adapun batas wilayah Kecamatan Peso adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kecamatan Peso Hilir;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Berau;
- Sebelah Utara : Kabupaten Malinau
- Sebelah Barat : Kabupaten Malinau

Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Peso membawahi 10 (sepuluh) wilayah pemerintahan desa. Masing-masing mempunyai ciri dan memiliki keanekaragaman struktur budaya masyarakatnya, meliputi : Long Peleban, Long Yiin, Long Buang, Long Lian, Muara Pengian, Long Peso, Long Leju, Lepak Aru, Long Lasan dan Long Bia.

Masyarakat Kecamatan ini cukup heterogen, terdiri dari berbagai suku. Suku asli masyarakatnya adalah dayak. Heterogenitas masyarakat ini disebabkan Bhayangkara pernah menjadi pusat kegiatan perusahaan besar. Sehingga berbagai warga berdatangan untuk bekerja dan sekaligus menetap di wilayah ini. Termasuk diantaranya berasimilasi dengan penduduk setempat. Berbagai suku yang ada diantaranya dayak dengan berbagai anak sukunya, banjar, jawa, bugis, tator, minang, batak, timur dan lain-lain.

Komoditi unggulan yang menjadi kekhasan Kecamatan ini adalah Kakao. Berdasarkan struktur tanahnya sangat cocok untuk ditanami dengan tanaman jenis perkebunan ini. Dalam setiap bulannya cukup banyak dihasilkan oleh masyarakat, sebagianya dijual ke pengumpul untuk kemudian dikirim ke Tawau.

Potensi SDA dan Wisata dari Kecamatan Peso meliputi:

- Wisata Alam Air terjun Km 17 dan perburuan
- Wisata Budaya Adat Daya Kenyah.
- Kehutanan, yang masih menyimpan potensi kayu-kayu log;
- Sangat cocok untuk perkebunan, karena hamparan tanah datarnya cukup luas.
- Pertambangan emas yang masih belum tergali.



KUANTITAS PENDUDUK

A. Persebaran (Distribusi) Penduduk

Kuantitas Penduduk diartikan sebagai jumlah penduduk yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu, yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi (perpindahan penduduk). Bab ini juga akan membahas komposisi penduduk berdasarkan jumlah dan persebaran penduduk serta penduduk menurut karakteristik demografi.

1. Jumlah dan Persebaran Penduduk

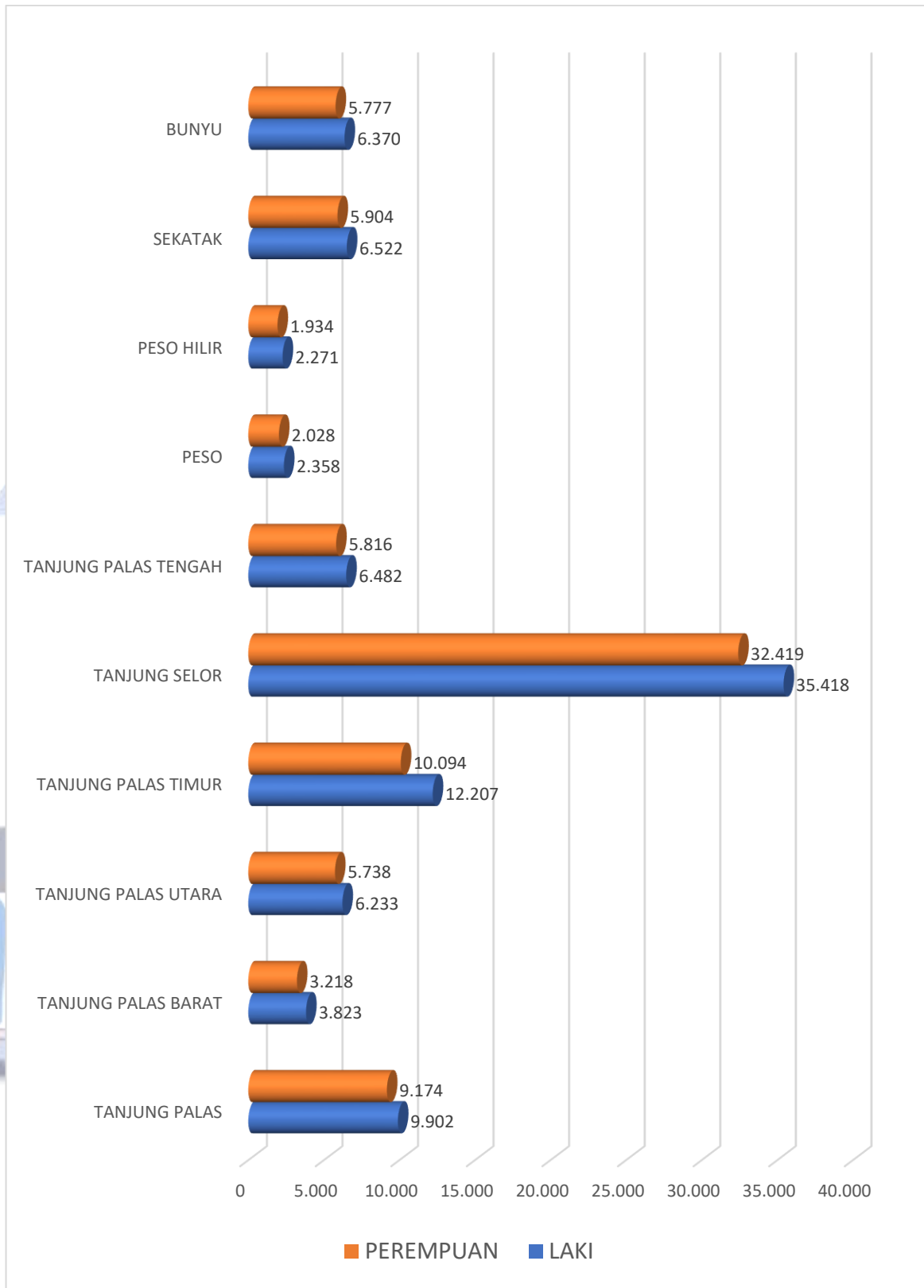
Pada akhir semester II 2025 jumlah penduduk Kabupaten Bulungan tercatat 173.688 jiwa. Dari jumlah tersebut terbesar (39,06%) bertempat tinggal di kecamatan/kota Tanjung selor, 12,84% bertempat tinggal di Tanjung Palas Timur dan sisanya bermukim di Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah, Peso, Peso Hilir, Sekatak dan Kecamatan Bunyu. Jumlah penduduk tercatat terendah (2,42%) bertempat tinggal di Kecamatan Peso Hilir (Lihat Tabel 3.1). Dengan luas 1.639,71 km² kepadatan penduduk Sekatak mencapai (1,4 jiwa/km²) terendah kedua setelah kepadatan penduduk Kecamatan Tanjung Palas (2,53 jiwa/km²) merupakan kepadatan penduduk paling rendah di kabupaten Bulungan. Kepadatan penduduk tertinggi (53,09 jiwa/km²) di kecamatan Bunyu dengan luas wilayah terkecil diantara ke-10 kecamatan-kecamatan di kabupaten Bulungan, Bunyu merupakan wilayah terpisah berbentuk pulau tersendiri yang kaya akan sumber energy terutama minyak bumi dan batubara sehingga banyak penduduk mendiami wilayah yang potensial secara ekonomi tersebut, ini yang menyebabkan kepadatan penduduk tinggi. Dibandingkan dengan kepadatan Kecamatan tanjung Selor yang merupakan pusat pemerintahan dan kota kabupaten memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Jumlah penduduk perkabupaten/kota yang ada di Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada di bawah ini:

Tabel 3.1: Jumlah Penduduk Per Kecamatan

NO	NAMA KECAMATAN	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TANJUNG PALAS	9.902	9.174	19.076
2	TANJUNG PALAS BARAT	3.823	3.218	7.041
3	TANJUNG PALAS UTARA	6.233	5.738	11.971
4	TANJUNG PALAS TIMUR	12.207	10.094	22.301
5	TANJUNG SELOR	35.418	32.419	67.837
6	TANJUNG PALAS TENGAH	6.482	5.816	12.298
7	PESO	2.358	2.028	4.386
8	PESO HILIR	2.271	1.934	4.205
9	SEKATAK	6.522	5.904	12.426
10	BUNYU	6.370	5.777	12.147
	JUMLAH	91.586	82.102	173.688

Apabila data di atas dituangkan dalam bentuk grafik persebaran penduduk maka dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.1: Jumlah Penduduk per Kecamatan



Adapun jumlah penduduk berdasarkan kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Bulungan dan jenis kelamin tahun 2025 disajikan dalam tabel dihalaman berikutnya :

Tabel 3.2: Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas

KECAMATAN TANJUNG PALAS				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TANJUNG PALAS HULU	870	828	1.698
2	TANJUNG PALAS TENGAH	1.249	1.306	2.555
3	TANJUNG PALAS HILIR	2.273	2.005	4.278
4	KARANG ANYAR	703	641	1.344
5	GUNUNG PUTIH	1.803	1.777	3.580
6	PEJALIN	652	571	1.223
7	ANTUTAN	1.340	1.188	2.528
8	TERAS BARU	459	394	853
9	TERAS NAWANG	553	464	1.017

Tabel 3.3: Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Barat

KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	LONG BELUAH	1.670	1.424	3.094
2	LONG SAM	538	430	968
3	MARA I	865	734	1.599
4	MARA HILIR	454	377	831
5	LONG PARI	296	253	549

Tabel 3.4: Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Utara

KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KARANG AGUNG	1.321	1.273	2.594
2	PIMPING	1.265	1.076	2.341
3	PANCA AGUNG	1.342	1.285	2.627
4	RUHUI RAHAYU	1.078	988	2.066
5	ARDI MULYO	399	333	732
6	KELUBIR	828	783	1.611

Tabel 3.5: Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Timur

KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TANAH KUNING	2.682	2.220	4.902
2	MANGKUPADI	2.338	1.831	4.169
3	SAJAU	1.879	1.484	3.363
4	WONOMULYO	934	831	1.765

5	TANJUNG AGUNG	855	729	1.584
6	BINAI	1.556	1.308	2.864
7	SAJAU HILIR	1.448	1.220	2.668
8	PURA SAJAU	515	471	986

Tabel 3.6: Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Selor

KECAMATAN TANJUNG SELOR				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TANJUNG SELOR HULU	3.103	2.923	6.026
2	TANJUNG SELOR HILIR	18.821	17.554	36.375
3	TANJUNG SELOR TIMUR	3.699	3.411	7.110
4	JELARAI SELOR	4.319	3.891	8.210
5	GUNUNG SERIANG	639	519	1.158
6	BUMI RAHAYU	1.033	881	1.914
7	GUNUNG SARI	1.173	923	2.096
8	APUNG	1.951	1.702	3.653
9	TENGGAPAK	680	615	1.295

Tabel 3.7: Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Tengah

KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SALIMBATU	3.215	2.911	6.126
2	SILVA RAHAYU	676	643	1.319
3	TANJUNG BUKA	2.591	2.262	4.853

Tabel 3.8: Jumlah Penduduk Kecamatan Peso

KECAMATAN PESO				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	LEPAK ARU	350	294	644
2	LONG LASAN	261	242	503
3	LONG PESO	364	340	704
4	LONG BIA	279	234	513
5	MUARA PANGEAN	255	222	477
6	LONG LIAN	181	151	332
7	LONG PELAAH	90	67	157
8	LONG LEJUH	235	186	421
9	LONG PELBAN	136	116	252
10	LONG BUANG	207	176	383

Tabel 3.9: Jumlah Penduduk Kecamatan Peso Hilir

KECAMATAN PESO HILIR				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	LONG TUNGU	528	452	980
2	LONG BANG	434	354	788
3	LONG TELENJAU	323	261	584
4	NAHA AYA	471	422	893
5	LONG LEMBU	225	193	418
6	LONG BANG HULU	290	252	542

Tabel 3.10: Jumlah Penduduk Kecamatan Sekatak

KECAMATAN SEKATAK				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SEKATAK BUJI	1.712	1.555	3.267
2	PARU ABANG	246	225	471
3	BUNAU	253	234	487
4	UJANG	263	247	510
5	TENGGILING	208	205	413
6	KELEMBUNAN	260	253	513
7	TURUNG	173	164	337
8	TERINDAK	278	240	518
9	KELISING	208	188	396
10	AMBALAT	161	144	305
11	KERITING	88	73	161
12	KENDARI	106	93	199
13	BAMBANG	99	88	187
14	MARITAM	152	150	302
15	PENTIAN	217	194	411
16	PUNAN DULAU	190	162	352
17	KELINCAUAN	263	241	504
18	BEKILIU	182	166	348
19	SEKATAK BENGARA	582	539	1.121
20	PUNGIT	434	359	793
21	ANJAR ARIP	91	81	172
22	LIAGU	356	303	659

Tabel 3.11: Jumlah Penduduk Kecamatan Bunyu

KECAMATAN BUNYU				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BUNYU BARAT	3.210	2.862	6.072
2	BUNYU SELATAN	1.673	1.579	3.252
3	BUNYU TIMUR	1.487	1.336	2.823

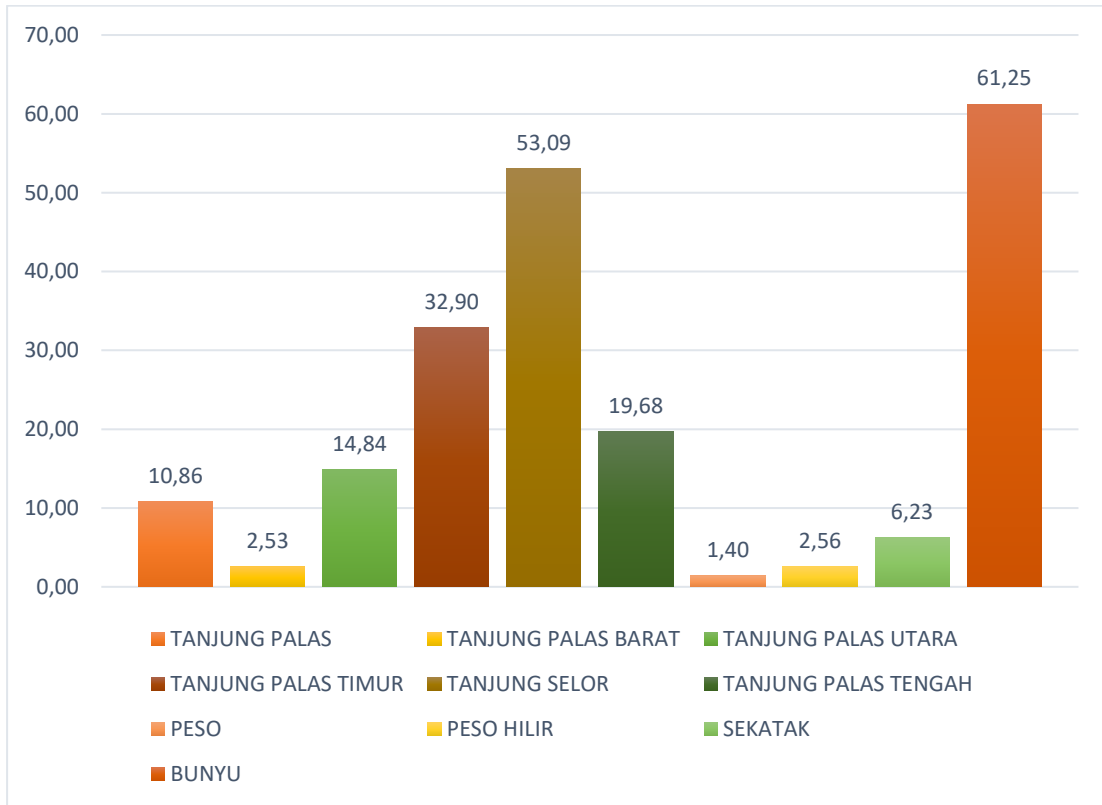
2. Kepadatan Penduduk (Population Density Ratio)

Kepadatan Penduduk adalah perbandingan banyaknya penduduk terhadap luas wilayah suatu daerah. Sedangkan masalah kepadatan penduduk seringkali ikut hadir pada suatu wilayah / daerah yang sedang mengurban (urbanisasi). Urbanisasi disini tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota, namun juga proses perubahan suatu wilayah yang sebelumnya sepi menjadi ramai dari segi jumlah penduduk dan bertambahnya infrastruktur fisik maupun fasilitas publik. Dengan mengetahui kepadatan penduduk maka dapat diketahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah serta dapat digunakan sebagai acuan untuk mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk (Program Transmigrasi).

Secara umum, permasalahan-permasalahan akibat kepadatan penduduk di Indonesia berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan. Dari segi kuantitas, jumlah penduduk yang besar berarti permasalahan dalam kemampuan menyediakan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan dari segi kualitas terlihat dari kemampuan dan daya saing Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Luas wilayah Kabupaten Bulungan tercatat seluas 18.010 Km². Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan. Kawasan permukiman yang cukup padat berada di Kecamatan Tanjung Selor, diikuti Kecamatan Tanjung Palas, dan Kecamatan yang lain. Data kepadatan penduduk Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada rasio kepadatan penduduk dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.2: Rasio Kepadatan Penduduk per Kecamatan (perjiwa/kilometer persegi)



3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah rata-rata laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah selama periode waktu tertentu, sehingga dapat diketahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. Laju pertumbuhan penduduk adalah salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi kependudukan suatu daerah di masa kini maupun di masa depan. Secara umum pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor alami yaitu kelahiran dan kematian, dan faktor non alami yaitu migrasi (perpindahan penduduk). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Bulungan adalah 170.239 jiwa dan jumlah penduduk di tahun 2025 adalah 173.668 jiwa. Dengan demikian perubahan jumlah penduduk yang berasal dari kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk adalah 3.449 jiwa dan pertumbuhan penduduk sebesar **2,02%**. Berikut pertumbuhan penduduk Kabupaten Bulungan tahun 2021-2025 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12: Pertumbuhan Penduduk Kabupaen Bulungan Tahun 2020-2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK					PERTUMBUHAN PENDUDUK RATA-RATA
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	TANJUNG PALAS	17.802	18.187	18.533	18.862	19.076	1,74
2	TANJUNG PALAS BARAT	6.788	6.918	6.922	6.967	7.041	0,92
3	TANJUNG PALAS UTARA	11.326	11.559	11.726	11.961	11.971	1,40
4	TANJUNG PALAS TIMUR	17.253	19.204	20.169	21.524	22.301	6,67
5	TANJUNG SELOR	57.861	61.203	63.588	65.810	67.837	4,06
6	TANJUNG PALAS TENGAH	12.192	12.530	12.439	12.389	12.298	0,23
7	PESO	4.204	4.287	4.294	4.361	4.386	1,07
8	PESO HILIR	4.143	4.216	4.185	4.158	4.205	0,38
9	SEKATAK	10.366	11.647	11.961	12.101	12.426	4,73
10	BUNYU	11.623	11.822	11.958	12.106	12.147	1,11
	JUMLAH	153.558	161.573	165.775	170.239	173.688	3,13

Dari tabel diatas terlihat bahwa laju pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulungan tahun 2025 adalah 3,13%. Laju pertumbuhan paling tinggi di peroleh dari Kecamatan Tanjung Palas Timur sebesar 6,67 %, sedangkan laju pertumbuhan paling kecil terdapat pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Tanjung Palas Barat, Peso Hilir, dan Tanjung Palas Tengah.

B. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Demografi adalah ilmu kependudukan yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis demografi merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Indikator penduduk menurut karakter demografi dapat dilihat dari usia dan jenis kelamin, status perkawinan, keluarga, pendidikan, agama, kecacatan, kelahiran dan kematian.

1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis kelamin

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6

bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk menurut kelompok umur merupakan penduduk yang dikelompokkan menurut kelompok umur 5 tahunan. Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan pekerjaan dan lain-lain. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Data penduduk ini juga sangat vital jika dikaitkan dengan program-program yang digalakkan pemerintah. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tergambar dalam table halaman selanjutnya:

Tabel 3.13: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		PENDUDUK	
	n	%	n	%	n	%
0-4	6.599	7,21	6.244	7,61	12.843	7,39
5-9	8.634	9,43	7.733	9,42	16.367	9,42
10-14	8.590	9,38	7.857	9,57	16.447	9,47
15-19	8.003	8,74	7.368	8,97	15.371	8,85
20-24	8.356	9,12	7.273	8,86	15.629	9,00
25-29	7.725	8,43	6.737	8,21	14.462	8,33
30-34	7.058	7,71	6.470	7,88	13.528	7,79
35-39	6.481	7,08	6.223	7,58	12.704	7,31
40-44	6.957	7,60	6.260	7,62	13.217	7,61
45-49	6.374	6,96	5.450	6,64	11.824	6,81
50-54	5.220	5,70	4.580	5,58	9.800	5,64
55-59	4.241	4,63	3.418	4,16	7.659	4,41
60-64	2.825	3,08	2.425	2,95	5.250	3,02
65-69	2.036	2,22	1.792	2,18	3.828	2,20
70-74	1.263	1,38	956	1,16	2.219	1,28
75+	1.224	1,34	1.316	1,60	2.540	1,46
TOTAL	91.586	100,00	82.102	100,00	173.688	100,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bulungan pada kelompok umur 10-14 tahun merupakan jumlah terbanyak dengan persentase sebesar 9,47% dan ini ada pada kelompok jenis kelamin laki-laki (9,38%) maupun perempuan (9,57%). Penduduk terbanyak kedua pada kelompok umur 5-9 tahun

sebesar 9,42% dari jumlah penduduk Kabupaten Bulungan. Kedua persentase terbesar ini merupakan usia sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama. Kondisi ini menuntut perhatian pemerintah Kabupaten Bulungan dalam penanganan kelompok penduduk usia ini karena menurut prediksi saat ini Indonesia sedang berada pada fase awal bonus demografi dimana puncaknya berada pada tahun 2028-2030. Bonus Demografi merupakan kondisi dimana suatu wilayah atau negara memiliki jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan usia non-produktif.

Prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara apabila ingin memperoleh manfaat besar bonus demografi yaitu sumber daya manusia yang berkualitas. Karena dengan adanya masyarakat yang berkualitas dapat meningkatkan pendapatan perkapita suatu negara apabila ada kesempatan kerja yang produktif. Kedua, terserapnya tenaga kerja menjadi faktor penting dalam memanfaatkan bonus demografi karena dengan banyak dibutuhkannya tenaga kerja, maka pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan akan meningkat pesat. Ketiga, meningkatkan tabungan di tingkat rumah tangga. Setiap rumah tangga memiliki potensi untuk membuka suatu usaha yang akan memberi lapangan pekerjaan untuk orang lain sehingga angka pengangguran menurun. Terakhir, peran perempuan yang masuk ke dalam pasar kerja akan membantu peningkatan pendapatan dan akan lebih banyak lagi penduduk usia produktif menjadi benar-benar produktif.

2. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah pada suatu waktu tertentu, yang dinyatakan dalam berapa banyaknya penduduk pria berbanding 100 orang wanita. Jika sex ratio diatas 100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, sedangkan bila sex rasionya kurang dari 100 berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.

Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan sumber daya manusia laki-laki dan perempuan secara adil. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh

masyarakat termasuk institusi partai politik, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen/legislatif.

Komposisi jumlah penduduk yang berimbang dan partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dalam setiap proses pembangunan akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Dari rasio jenis kelamin ini, diharapkan penentu kebijakan di level pusat dan daerah dapat membuat legislasi secara adil dan tidak bias gender. Dengan jumlah penduduk yang hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan, maka sangat dibutuhkan peran aktif kedua belah pihak di berbagai bidang pembangunan, sehingga dapat dirasakan kesetaraan gender yang pada akhirnya akan mewujudkan tujuan pembangunan yang adil dan makmur. Data penduduk berdasarkan kelompok umur dan rasio jenis kelamin (sex ratio) Kabupaten Bulungan selengkapnya pada tabel berikut :

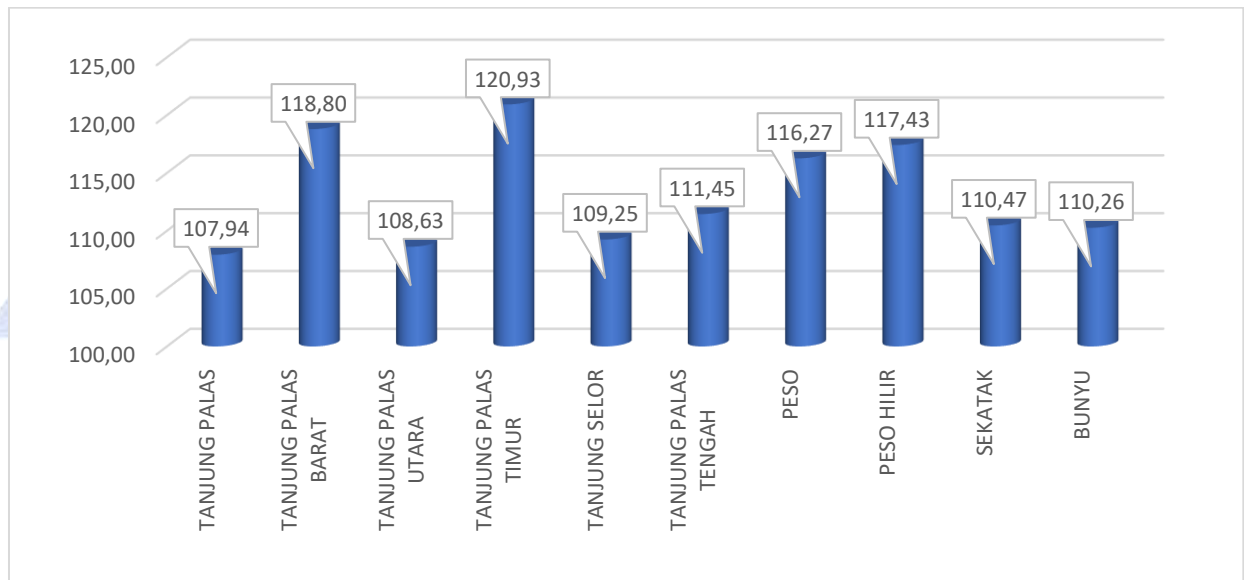
Tabel 3.14: Jumlah Penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin

NO	KECAMATAN	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO (%)
1	TANJUNG PALAS	9.902	9.174	19.076	107,94
2	TANJUNG PALAS BARAT	3.823	3.218	7.041	118,80
3	TANJUNG PALAS UTARA	6.233	5.738	11.971	108,63
4	TANJUNG PALAS TIMUR	12.207	10.094	22.301	120,93
5	TANJUNG SELOR	35.418	32.419	67.837	109,25
6	TANJUNG PALAS TENGAH	6.482	5.816	12.298	111,45
7	PESO	2.358	2.028	4.386	116,27
8	PESO HILIR	2.271	1.934	4.205	117,43
9	SEKATAK	6.522	5.904	12.426	110,47
10	BUNYU	6.370	5.777	12.147	110,26
	JUMLAH	91.586	82.102	173.688	111,55

Dari tabel di atas nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau Sex Ratio di Kabupaten Bulungan adalah 111,55 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 111 orang penduduk laki-laki. Jika dilihat per kabupaten/kota pada tabel, terlihat bahwa rasio jenis kelamin (sex ratio) di setiap Kabupaten/Kota di atas 100, hal ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki di setiap Kecamatan lebih banyak daripada perempuan. Jika diamati masing-masing wilayah Kecamatan, maka terlihat bahwa Kecamatan Tanjung Palas Timur memiliki rasio jenis kelamin tertinggi

yaitu 120,93% diikuti Kecamatan Tanjung Palas Barat sebesar 118,8%; Kecamatan Peso Hilir sebesar 117,43; Kecamatan Peso sebesar 116,27; sedangkan rasio jenis kelamin terendah adalah Kecamatan Tanjung Palas sebesar 107,94%. Apabila data rasio jenis kelamin ini disajikan dalam bentuk grafik, maka akan terlihat seperti di halaman berikut:

Grafik 3.3: Rasio Jenis Kelamin



3. Piramida Penduduk

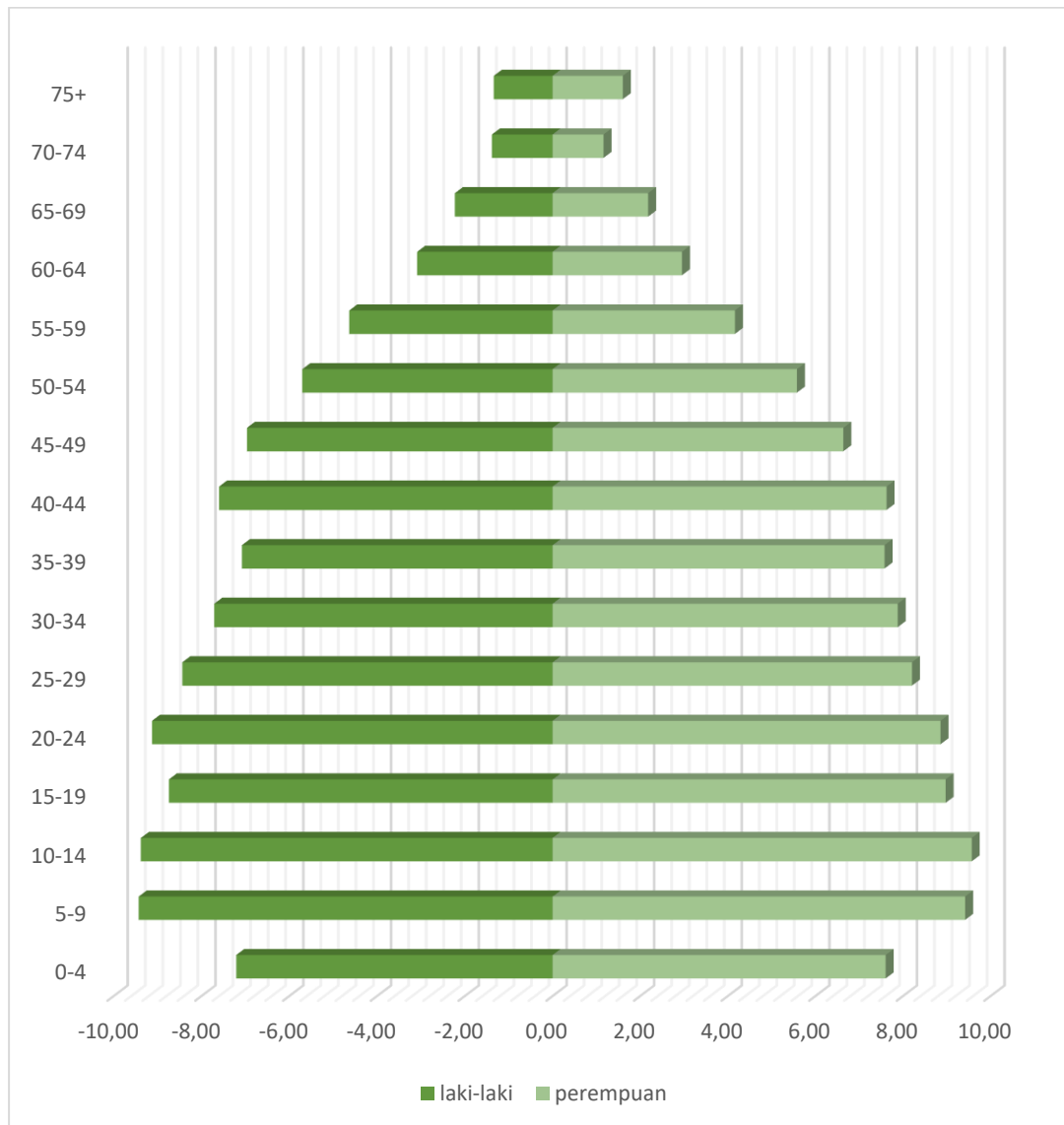
Piramida Penduduk adalah grafik mendatar atau diagram batang yang menyajikan data penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin dan daerah suatu penduduk. Piramida penduduk disajikan dalam dua buah grafik batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk lima tahunan. Untuk laki-laki digambarkan di sisi kanan dan untuk perempuan di sisi kiri. Piramida penduduk ini mengandung beberapa informasi, yaitu:

- 1) Jumlah angka kelahiran semakin bertumbuh sehingga jumlah penduduk juga bertambah;
- 2) Rasio perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan;
- 3) Penggolongan penduduk berdasarkan usia secara berkala;
- 4) Jumlah usia produktif dan non-produktif;
- 5) Jumlah lapangan kerja yang dibutuhkan;

- 6) Kebutuhan infrastruktur pendidikan untuk penduduk;
- 7) Perkiraan jumlah kelahiran di masa depan;
- 8) Perkiraan jumlah kematian yang akan terjadi, dsb.

Berikut gambaran piramida penduduk Kabupaten Bulungan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin :

Tabel 3.4: Grafik Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur



Piramida penduduk Kabupaten Bulungan tahun 2025 berdasarkan komposisi penduduk umur dan jenis kelamin menunjukkan ciri Expansive yang artinya sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda dan umur produktif dibandingkan kelompok umur di atasnya dan Rapid Growth yang artinya persentase penduduk umur muda yang besar. Pada piramida penduduk di atas, terlihat bahwa

jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida lebih kecil dari kelompok umur di atasnya yang berarti usia 0-4 tahun atau balita lebih sedikit daripada usia 5-9 tahun, dst. Jumlah terbesar adalah penduduk 5-9 tahun, yang berarti dibutuhkan perhatian lebih untuk mengakomodir pemenuhan segala kebutuhan penduduk kelompok umur ini contohnya penyediaan sekolah dasar di sektor pendidikan.

Selanjutnya ukuran untuk menyatakan "tua-muda" suatu penduduk dapat dilihat dari umur median penduduk tersebut. Umur median adalah umur yang membagi jumlah penduduk tepat menjadi dua bagian yang sama jumlahnya, bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua daripada umur median. Umur median digunakan untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu. Penduduk Kabupaten Bulungan termasuk dalam kategori penduduk Intermediate. Setelah dihitung umur median penduduk Kabupaten Bulungan tahun 2025 adalah 29,56 tahun, yang berarti setengah penduduk Kabupaten Bulungan pada tahun 2023 berusia di bawah 29 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 29. Dengan kata lain, penduduk Kabupaten Bulungan dikategorikan sebagai penduduk dewasa.

4. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator kasar yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dan usia non-produktif (umur 0-14 tahun ditambah umur 65 tahun ke atas). Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk non-produktif. Sebaliknya semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban kelompok produktif untuk menanggung penduduk usia belum produktif dan atau tidak produktif. Data kependudukan menurut kelompok produktif dan jenis kelamin Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15: Tabel Rasio Ketergantungan

Kelompok Umur	laki-laki		perempuan		Total	
	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%
<14	23.823	26,01	21.834	26,59	45.657	26,29
15-64	63.240	69,05	56.204	68,46	119.444	68,77
>65	4.523	4,94	4.064	4,95	8.587	4,94
Jumlah	91.586	100	82.102	100	173.688	100

Jika melihat tabel di atas dapat dianalisa bahwa hampir tiga perempatnya merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur 15-64 tahun yang berjumlah 119.444 jiwa (68,77 %). Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa penduduk laki-laki dan perempuan yang terbesar berada pada kelompok umur 15-64 tahun. Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar penduduk merupakan penduduk usia kerja (usia produktif) yang berpotensi sebagai modal pembangunan dan sisanya sebanyak 45.657 jiwa (26,29 %) merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun) serta 8.587 jiwa (4,94%) merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

Penduduk usia kurang dari 15 tahun harus mendapat perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi tenaga kerja baru yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai. Karena itu diperlukan dukungan sektor pendidikan atau pelatihan dengan fasilitas yang baik serta lingkungan yang mendukung serta menyebar di seluruh wilayah Kecamatan. Sehingga ketika mereka memasuki dunia kerja, mampu menjadi tenaga kerja yang profesional. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten sejak dini harus mendorong sebuah kebijakan agar masyarakat mampu mendapatkan asupan gizi yang baik, sarana prasarana pendidikan yang memadai serta lingkungan yang ramah anak, baik di rumah di sekolah maupun di tempat umum, menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dan lebih berkualitas. Jika melihat struktur umur penduduk Kabupaten Bulungan maka rasio ketergantungannya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$DR = \frac{\text{Jumlah usia nonproduktif}}{\text{Usia produktif}} \times 100$$

$$DR = \frac{45.657 + 8.587}{119.444} \times 100$$

$$= 45,49$$

Hitungan diatas menunjukkan rasio ketergantungan Kabupaten Bulungan tahun 2025 sebesar 45,49 Angka ini menunjukkan dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Bulungan mempunyai tanggungan sekitar 46 penduduk usia non produktif.

5. Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin

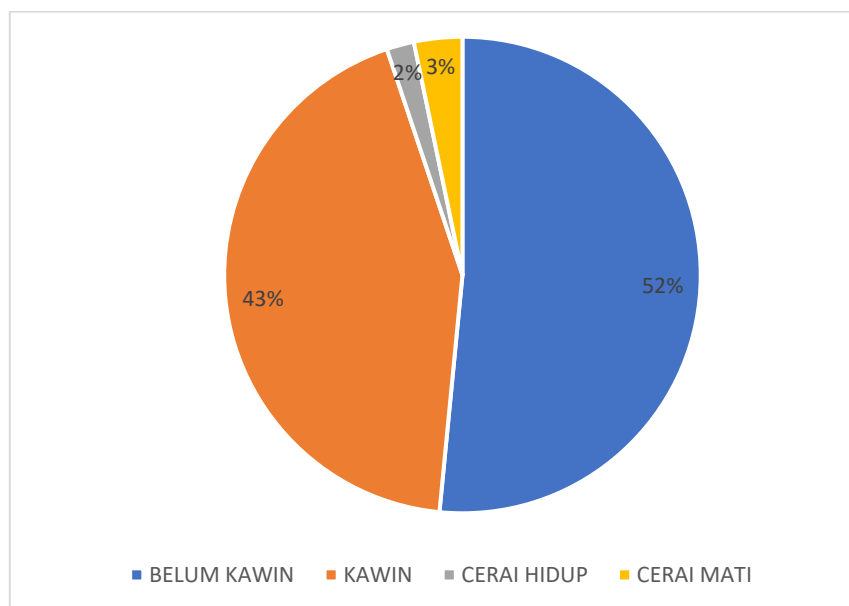
Jumlah penduduk jika dilihat menurut status perkawinan per Kepala Keluarga dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.16: Tabel Rasio Status Perkawinan

STATUS KAWIN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PRESENTASE
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
BELUM KAWIN	50.885	38.638	89.523	51,54
KAWIN	37.806	37.431	75.237	43,32
CERAI HIDUP	1.564	1.672	3.236	1,86
CERAI MATI	1.331	4.361	5.692	3,28
TOTAL	91.586	82.102	173.688	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bulungan didominasi penduduk berstatus belum Kawin sebanyak 51,54 %. Jika dilihat menurut Jenis kelamin terlihat bahwa proporsi penduduk laki-laki yang belum kawin lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan yang belum kawin. Hal ini dapat disebabkan karena laki-laki cenderung meneruskan pendidikan dan / atau baru mulai bekerja untuk dapat membiayai pernikahannya sehingga menunda perkawinan dan juga dapat disebabkan laki-laki yang nantinya akan menjadi kepala rumah tangga berkeinginan untuk hidup mapan secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan berumah tangga demi memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

Grafik 3.5: Rasio Status Perkawinan



Proporsi penduduk dengan status cerai hidup dan cerai mati lebih tinggi pada perempuan dibandingkan penduduk laki-laki. Pada beberapa kasus hal ini dapat disebabkan karena perempuan memiliki lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali khususnya pada perempuan yang mandiri secara ekonomi sehingga menunda perkawinan kembali, dapat pula disebabkan masih adanya trauma dari perkawinan sebelumnya.

C. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang diselesaikan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan keterampilan baik hard skill maupun soft skill. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja keterampilan tetapi juga attitude (sikap perilaku/kepribadian), karena kepribadian dapat mencerminkan etos kerja dan untuk meningkatkan kepribadian membutuhkan waktu yang relatif lama, sedangkan keterampilan dapat ditingkatkan melalui bimbingan dan pelatihan.

Tamat belajar/pendidikan didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Jenjang pendidikan tertinggi merupakan jenjang atau kelas pendidikan

tertinggi yang pernah diselesaikan oleh seseorang. Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu memperhatikan kondisi saat ini mengingat bahwa era revolusi industri 4.0 telah berlangsung dan persaingan yang ketat untuk memperoleh pekerjaan di Indonesia.

Perlunya peningkatan pendidikan misalnya program 1 Sarjana 1 KK untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan eksplorasi terhadap pekerjaan baik menciptakan lapangan pekerjaan maupun sebagai tenaga kerja yang berkualitas, penilaian terhadap kemampuan diri yang dikaitkan dengan masalah pekerjaan, perencanaan pekerjaan, pengambilan keputusan dalam pemilihan pekerjaan. Peningkatan akses kependidikan yang merata terutama untuk penduduk perbatasan, 3T (tertinggal, terpencil, terluar) serta ekonomi menengah kebawah perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki keterampilan khusus. Untuk data penduduk menurut pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.17: Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

PENDIDIKAN	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
TIDAK/BLM SEKOLAH	31.631	34,54	29.478	35,90	61.109	35,18
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	10.955	11,96	9.628	11,73	20.583	11,85
TAMAT SD/SEDERAJAT	14.195	15,50	12.971	15,80	27.166	15,64
SLTP/SEDERAJAT	10.054	10,98	9.367	11,41	19.421	11,18
SLTA/SEDERAJAT	17.845	19,48	13.142	16,01	30.987	17,84
DIPLOMA I/II	317	0,35	361	0,44	678	0,39
AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA	864	0,94	1.500	1,83	2.364	1,36
DIPLOMA IV/STRATA I	5.291	5,78	5.461	6,65	10.752	6,19
STRATA-II	422	0,46	191	0,23	613	0,35
STRATA-III	12	0,01	3	0,00	15	0,01
JUMLAH	91.586	100,00	82.102	100,00	173.688	100,00

Dengan melihat jumlah komposisi penduduk yang memiliki pendidikan SLTA / Sederajat keatas tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian dan kesejahteraan karena pendidikan formal yang ditamatkan cukup berpengaruh terhadap penghasilan yang diperoleh. Artinya, penduduk yang tingkat pendidikannya rendah tidak akan terserap oleh pasar tenaga kerja, akan menjadi pengangguran, sehingga menambah pula jumlah penduduk miskin. Keterkaitan tingkat pendidikan dengan kemiskinan sangat besar, karena pendidikan memberikan kesempatan

terhadap individu untuk berkembang melalui ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kemiskinan muncul karena sumber daya manusia yang rendah, dan kemiskinan juga menghalangi seseorang untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi.

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dalam Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya”, memberikan jaminan kepada seluruh warga negaranya untuk melaksanakan ibadah atau ritual agamanya. Agama di sini meliputi seluruh sistem kepercayaan, baik agama-agama samawi monotheis, polytheis, maupun agama-agama yang bersumber dari adat istiadat atau kepercayaan leluhur.

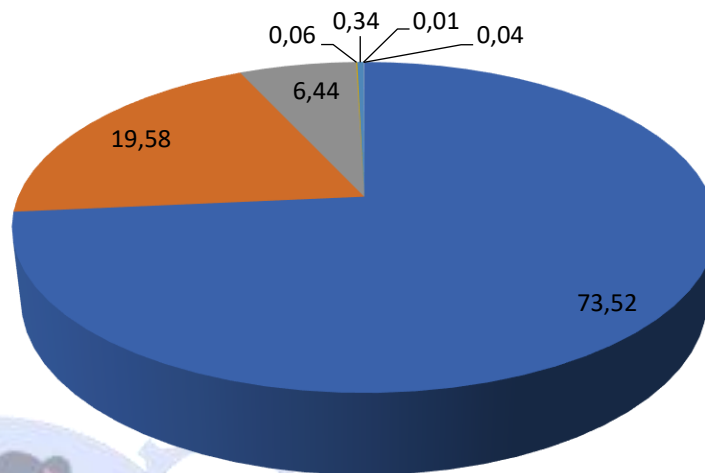
Kemudian dalam hal kebijakan bidang keberagamaan, data penduduk berdasarkan agama yang dianut dapat menjadi acuan pemerintah untuk mengambil kebijakan terkait dengan kebebasan dan toleransi kehidupan beragama, dan perencanaan sarana dan prasarana peribadatan. Data agama penduduk dibagi tiap jenis kelamin dan setiap kabupaten/kota di Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.18: Jumlah Pemeluk Agama/Kepercayaan

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PRESENTASE (%)
ISLAM	67.015	60.686	127.701	73,52
KRISTEN	18.165	15.851	34.016	19,58
KATHOLIK	5.994	5.189	11.183	6,44
HINDU	68	41	109	0,06
BUDHA	300	293	593	0,34
KONGHUCU	5	7	12	0,01
KEPERCAYAAN	39	35	74	0,04

Dilihat dari tabel diatas penduduk Kabupaten Bulungan didominasi pemeluk agama Islam sebesar 127.701 jiwa (73,52%) disusul kemudian pemeluk agama Kristen sebesar 34.016 jiwa (19,58%) dan Katholik 11.183 jiwa (6,44%) sedangkan Hindu, Budha dan Konghucu serta aliran Kepercayaan masih sangat sedikit dibawah 1%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafik 3.6: Jumlah Pemeluk Agama / Kepercayaan



■ ISLAM ■ KRISTEN ■ KATHOLIK ■ HINDU ■ BUDHA ■ KONGHUCU ■ KEPERCAYAAN

3. Jumlah Rata-Rata Anggota Keluarga

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1988, mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul, serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Definisi ini digunakan pada pengajaran di sekolah-sekolah, seperti yang terdapat pada salah satu modul pengajaran sosiologi yang menjelaskan bahwa keluarga adalah kelompok sosial terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) serta anak. Modul tersebut juga menyebutkan bahwa setiap anggota dalam keluarga memiliki peranan yang berbeda. Pada masa lampau, peran ayah seringkali diasosiasikan sebagai pencari nafkah utama. Sementara itu, ibu mengurus semua kebutuhan di rumah, seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengasuh anak namun mereka adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pendefinisian keluarga oleh pemerintah pada masa itu tentunya disesuaikan dengan kondisi riil yang banyak ditemui di masyarakat. Pada akhir tahun 1980-an, keluarga ideal adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, nenek, kakek, paman, bibi, dan anak. Tiap anggota keluarga tersebut memiliki peran yang berbeda-beda namun saling melengkapi. Situasi tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki kontrol yang kuat terhadap masyarakat pada masa itu, baik melalui media maupun

pendidikan. Hal ini tidak mengherankan sebab pembatasan jumlah anak menjadi salah satu prioritas pembangunan utama oleh pemerintah masa itu. Sebagai konsekuensinya, definisi keluarga pun mengikuti arah pembangunan tersebut.

Definisi lain dari keluarga adalah ia merupakan unit terkecil dari masyarakat dalam sistem sosial sebagai tempat untuk belajar bersosialisasi, artinya proses belajar bagi individu menempatkan diri dalam masyarakat dan kelompok sosialnya. Keluarga merupakan embrio atau miniatur berbagai unsur sistem sosial manusia. Oleh karena itu, kondisi keluarga dapat mempengaruhi kualitas sebuah masyarakat. Dalam UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan dan lain sebagainya.

Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga inti/batih (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). *Nuclear family* adalah keluarga inti atau keluarga dasar yaitu istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah keluarga, kelompok yang terdiri dari sepasang orang dewasa dan anak-anak mereka. *Extended family* adalah keluarga diluar keluarga inti, yang terdiri dari kakek-nenek, bibi, paman, dan sepupu semua yang tinggal didekatnya atau di rumah yang sama. Besarnya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga relatif diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya namun setiap keluarga berbeda-beda.

Jika melihat realitas sosial saat ini, beberapa definisi keluarga di atas, ada yang masih relevan dan ada pula yang sudah tidak relevan lagi. Persyaratan yang masih relevan adalah adanya syarat perkawinan, hubungan darah, atau pun adopsi. Syarat lain yang masih relevan adalah fungsi keluarga sebagai penerus kebudayaan. Hal ini tercermin dalam pengalaman sehari-hari ketika generasi muda lebih banyak belajar dari keluarga mengenai masakan, bahasa, silsilah keluarga, ataupun cara berinteraksi dibandingkan dari pihak lain selain keluarga. Ikatan kekeluargaan yang masih sangat kuat di Indonesia menjadi dasar argumen relevansi syarat ini.

Dengan kondisi seperti diuraikan di atas, kepemilikan Kartu Keluarga (KK) menjadi sangat penting. KK merupakan kartu identitas bagi sebuah keluarga yang memuat berbagai data penting, seperti nama, susunan anggota keluarga, hubungan, pekerjaan setiap anggota keluarga, dan berbagai informasi penting lainnya. Dalam penggunaannya, kartu keluarga akan sering dipakai sebagai salah satu persyaratan utama dalam pengurusan administrasi dan juga berbagai dokumen penting. Misalnya, pembuatan akta kelahiran bagi anak, pendaftaran anak masuk sekolah, penggantian KTP, dan berbagai urusan perbankan juga akan membutuhkan kartu keluarga sebagai persyaratannya.

Tabel 3.19: Jumlah Rata-rata Keluarga

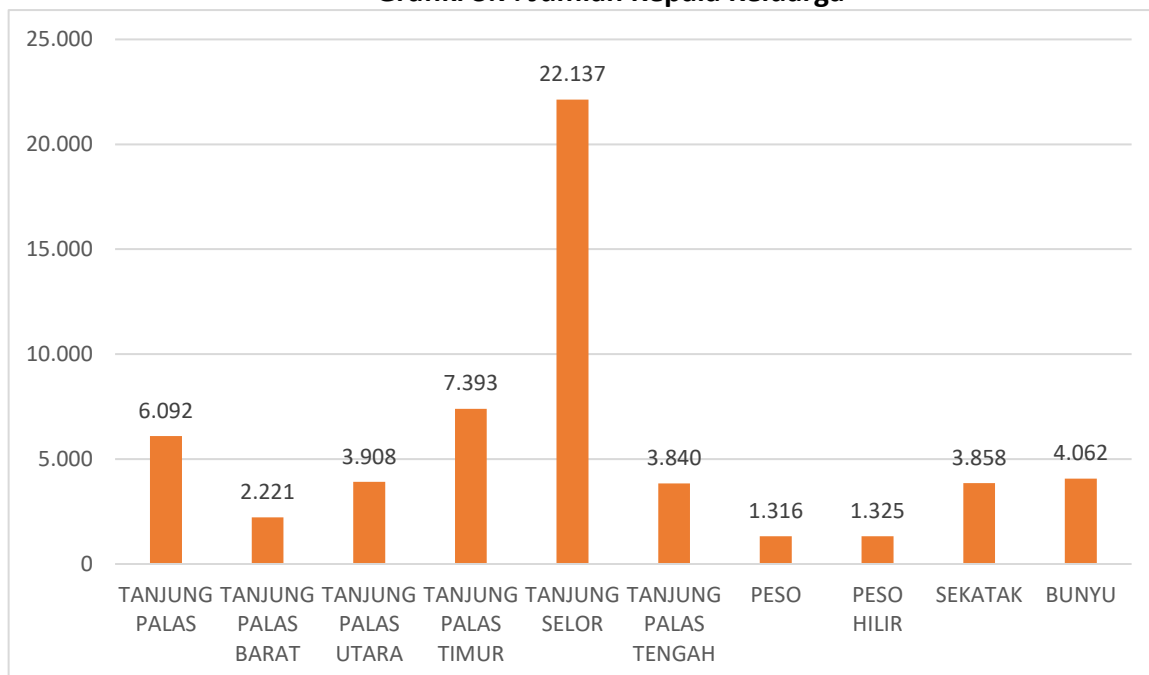
NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	PENDUDUK	RATA – RATA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
1	TANJUNG PALAS	6.092	19.076	3,13
2	TANJUNG PALAS BARAT	2.221	7.041	3,17
3	TANJUNG PALAS UTARA	3.908	11.971	3,06
4	TANJUNG PALAS TIMUR	7.393	22.301	3,02
5	TANJUNG SELOR	22.137	67.837	3,06
6	TANJUNG PALAS TENGAH	3.840	12.298	3,20
7	PESO	1.316	4.386	3,33
8	PESO HILIR	1.325	4.205	3,17
9	SEKATAK	3.858	12.426	3,22
10	BUNYU	4.062	12.147	2,99
	JUMLAH	56.152	173.688	3,09

Dilihat dari tabel di atas jumlah keluarga di Kabupaten Bulungan sebanyak 56.152 keluarga yang tersebar di 10 Kecamatan. Kecamatan Tanjung Selor sebesar 22.137 keluarga, selanjutnya Kecamatan Tanjung Palas Timur memiliki 7.393 keluarga, dan selanjutnya Kecamatan Tanjung Palas sebanyak 6.092 keluarga dan jumlah keluarga terkecil berada di Kecamatan Peso yaitu 1.316 keluarga.

Sedangkan rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Bulungan sebesar 3,09%. Kecamatan Peso memiliki rata-rata jumlah anggota keluarga tertinggi sebesar 3,33% disusul Kecamatan Tanjung Palas Tengah sebesar 3,2%, Kecamatan Tanjung

Palas Barat 3,17% dan terkecil Kecamatan Bumyu sebesar 2,99%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafikl 3.7: Jumlah Kepala Keluarga



Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan program keluarga berencana di wilayah Kabupaten Bulungan dan dapat digunakan di Kecamatan dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang keluarganya beranggotakan 3 orang.

KUALITAS PENDUDUK

Kualitas Penduduk merupakan kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. Aspek-aspek tersebut merupakan Indikator Pembangunan Manusia (Human Development Index) dalam pemenuhan kesejahteraan. Kualitas Pendidikan penduduk dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dihitung dari angka melek aksara/huruf dan jenjang pendidikan yang telah ditempuh, aspek kesehatan dihitung dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup waktu lahir; dan aspek kesejahteraan dihitung dari penghasilan per kapita.

Permasalahan kualitas kependudukan di Indonesia masih berkuat pada soal sumber daya manusianya, karena rendahnya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, hingga berakibat pada rendahnya kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. BKKBN menyebutkan beberapa masalah kependudukan di Indonesia, yaitu:

1. Jumlah penduduk besar tetapi kualitas relatif rendah;
2. Laju pertumbuhan penduduk tinggi;
3. Fertilitas relatif tinggi dengan penyebaran yang tidak merata;
4. Angka kematian ibu dan anak tinggi, sedangkan angka harapan hidup relatif rendah;
5. Persebaran penduduk yang tidak merata.

A. Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor terpenting yang dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas seseorang. Tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan ibu saat melahirkan. Semakin

rendah angka kematian bayi dan ibu saat melahirkan, berarti semakin baik tingkat kesehatan penduduk.

Rendahnya tingkat kesehatan suatu daerah, antara lain disebabkan oleh banyaknya lingkungan yang kotor dan sanitasi yang buruk, dan terbatasnya akses layanan kesehatan. Untuk meningkatkan tingkat kesehatan penduduk, pemerintah melakukan berbagai upaya di antaranya melaksanakan program perbaikan gizi khususnya untuk anak-anak balita, peningkatan kesadaran penduduk untuk berperilaku hidup sehat, penambahan sarana dan prasarana kesehatan juga diperlukan untuk meratakan pelayanan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat, program penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi lingkungan, berupa pembangunan jamban keluarga, pembuatan sumur, penyediaan tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah beberapa indikator untuk melihat kualitas penduduk :

1. Angka Kelahiran Umum / General Fertility Rate (GFR)

Angka Kelahiran Umum / General Fertility Rate (GFR) adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur 15-49 tahun. Angka ini dapat digunakan untuk membedakan fertilitas menurut umur. GFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari perempuan yang terpapar untuk melahirkan yaitu perempuan usia subur dengan memperhatikan karakteristik kelompok umurnya. Secara alamiah potensi fekunditas perempuan untuk melahirkan berbeda menurut umur dan relatif menjadi steril/tidak subur setelah menopause atau usia 49 tahun keatas. Secara sosial ada kecenderungan bahwa saat ini perempuan ingin membatasi jumlah anak setelah umur 35 tahun.

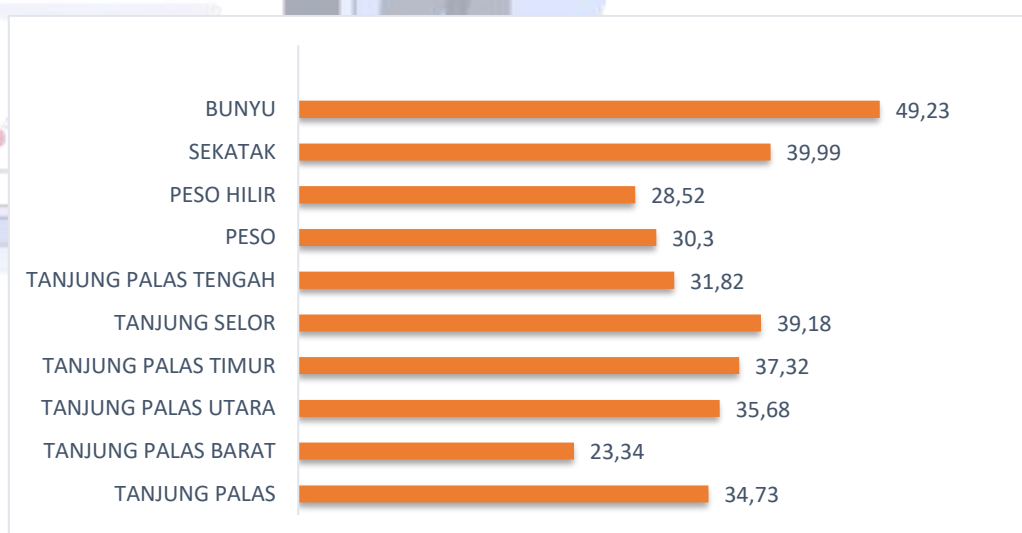
Pengetahuan mengenai GFR akan berguna untuk pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Indikator GFR merupakan data dasar untuk mengembangkan proyeksi penduduk untuk mengetahui jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin dimasa yang akan datang. Hasil proyeksi penduduk merupakan basis data untuk perencanaan pembangunan manusia di tahun-tahun mendatang.

Tabel 4.1: Angka Kelahiran Menurut Umum

KECAMATAN	ANGKA KELAHIRAN	PEREMPUAN USIA (15-49)	ASFR
TANJUNG PALAS	176	5.067	34,73
TANJUNG PALAS BARAT	40	1.714	23,34
TANJUNG PALAS UTARA	110	3.083	35,68
TANJUNG PALAS TIMUR	213	5.707	37,32
TANJUNG SELOR	734	18.735	39,18
TANJUNG PALAS TENGAH	101	3.174	31,82
PESO	34	1.122	30,3
PESO HILIR	29	1.017	28,52
SEKATAK	127	3.176	39,99
BUNYU	147	2.986	49,23
JUMLAH	1.711	45.781	37,37

Dari Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa GFR di Kabupaten Bulungan sebesar 37,37 artinya dari 1.000 penduduk perempuan usia 15-49 tahun terjadi kelahiran 37 jiwa. Dari data ini dapat dilihat bahwa angka ASFR di Kabupaten Bulungan mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 38. Jika dilihat per Kecamatan nilai ASFR tertinggi adalah Kecamatan Bunyu sebesar 49,23 dan terendah adalah Kecamatan Peso Hilir sebesar 28,52 Namun seluruh Kecamatan mengalami penurunan pada angka ASFR dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 4.1: Angka Kelahiran Umum (GFR)



2. Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ratio/CWR)

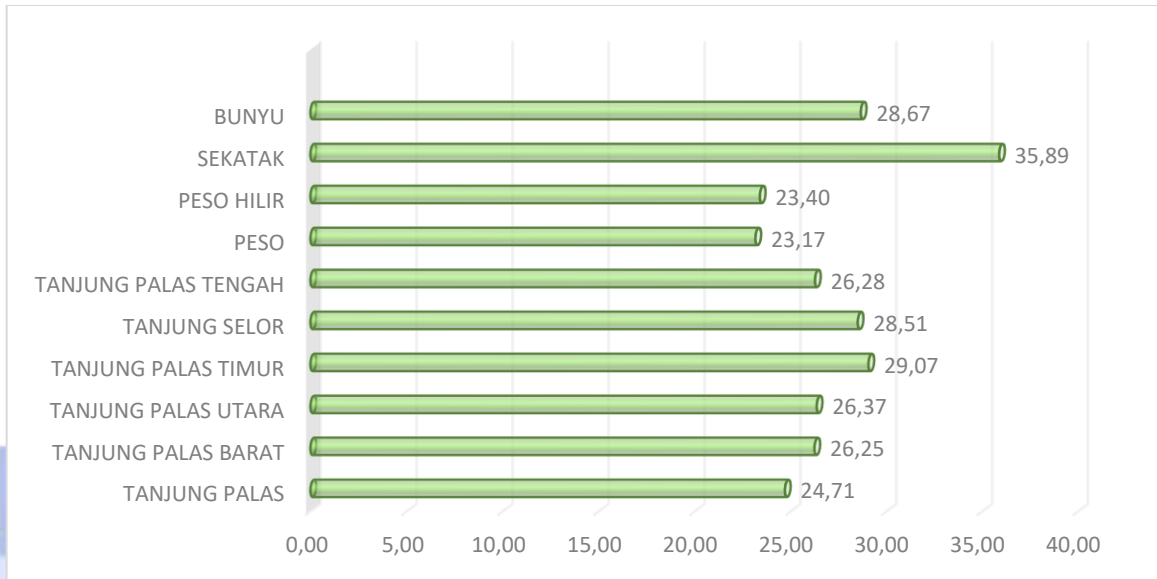
Rasio anak dan perempuan adalah perbandingan antara anak di bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) di suatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan bisa digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi. Tabel data rasio anak dan perempuan di Kecamatan se-Kabupaten Bulungan yaitu:

Tabel 4.2: Rasio Anak dan Perempuan

KECAMATAN	Jumlah Perempuan Usia (15-49)	Jumlah Anak Usia (0-14)	Rasio Anak dan Perempuan (CWR)
TANJUNG PALAS	5.067	1.252	24,71
TANJUNG PALAS BARAT	1.714	450	26,25
TANJUNG PALAS UTARA	3.083	813	26,37
TANJUNG PALAS TIMUR	5.707	1.659	29,07
TANJUNG SELOR	18.735	5.341	28,51
TANJUNG PALAS TENGAH	3.174	834	26,28
PESO	1.122	260	23,17
PESO HILIR	1.017	238	23,40
SEKATAK	3.176	1.140	35,89
BUNYU	2.986	856	28,67
JUMLAH	45.781	12.843	28,05

Pada tahun 2025, besarnya rasio anak dan perempuan di Kabupaten Bulungan sebesar 28 hal ini berarti bahwa diantara 100 perempuan usia produktif terdapat 28 Penduduk usia Anak (0-14) Tahun. Tahun 2025 CWR tertinggi di Kecamatan Sekatak yaitu 35,89 disusul Kecamatan Tanjung Palas Timur sebesar 29,07; kemudian Kecamatan Bunyu 28,67. Angka CWR di Kabupaten Bulungan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 4.2: Rasio Anak dan Perempuan



B. Pendidikan

Untuk sektor pendidikan data yang disajikan adalah data jumlah lulusan penduduk berdasarkan satuan pendidikan terakhir. Data tersebut berfungsi untuk melihat tingkat pendidikan penduduk yang ada di kabupaten Bulungan. Untuk data tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3: Latar Belakang Pendidikan Terakhir

WILAYAH	TIDAK/BL M SEKOLAH JML	BELUM TAMAT SD/SEDE RAJAT JML	TAMAT SD/SEDE RAJAT JML	SLTP/SE ERAJAT JML	SLTA/SE DERAJAT JML	DIPLOM A I/II/III	DIPLOM A IV/STRAT A I JML	STRAT A-II JML	STRAT A-III JML
TANJUNG PALAS	6.388	2.187	3.172	2.296	3.620	309	1.065	39	0
TANJUNG PALAS BARAT	2.380	948	1.366	906	1.118	94	224	5	0
TANJUNG PALAS UTARA	4.083	1.490	2.422	1.551	1.828	131	457	8	1
TANJUNG PALAS TIMUR	8.218	2.800	4.767	2.695	3.013	194	604	9	1
TANJUNG SELOR	22.444	6.547	8.016	7.086	14.468	1.765	6.973	525	13
TANJUNG PALAS TENGAH	4.071	1.697	2.978	1.542	1.593	92	321	4	0
PESO	1.358	668	835	609	672	72	168	4	0
PESO HILIR	1.527	634	831	498	550	54	106	5	0
SEKATAK	6.479	2.353	1.344	775	1.121	84	268	2	0
BUNYU	4.161	1.259	1.435	1.463	3.004	247	566	12	0
BULUNGAN	61.109	20.583	27.166	19.421	30.987	3.042	10.752	613	15

C. Perekonomian


Jika mengacu UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, BAB 1 pasal 1 ayat 2 menyatakan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang / jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan definisi tenaga kerja menurut International Labour Organization (ILO) adalah penduduk usia kerja (penduduk berumur 15 tahun keatas) yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh uang / pendapatan atau membantu melakukan kegiatan ekonomi. Batasan ini sejalan dengan ketentuan perundangan, khususnya bidang ketenagakerjaan yang membatasi usia minimum pekerja adalah 15 tahun.

1. Proporsi Jenis Pekerjaan

Data penduduk di Kabupaten Bulungan yang mempunyai jenis pekerjaan sesuai dengan Data Kependudukan Bersih (DKB) Tahun 2025 semester 2 yang dikeluarkan Ditjen Dukcapil Kemendagri dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4: Jenis Pekerjaan Penduduk

No	PEKERJAAN	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	65.623
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	31.192
3	PELAJAR/MAHASISWA	19.257
4	PENSIUNAN	861
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	5.039
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	656
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	1.097
8	PERDAGANGAN	413
9	PETANI/PEKEBUN	13.815
10	PETERNAK	32
11	NELAYAN/PERIKANAN	6.672
12	INDUSTRI	12
13	KONSTRUKSI	29
14	TRANSPORTASI	128
15	KARYAWAN SWASTA	10.345
16	KARYAWAN BUMN	180
17	KARYAWAN BUMD	115
18	KARYAWAN HONORER	2.292
19	BURUH HARIAN LEPAS	2.052
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1.765
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	478
22	BURUH PETERNAKAN	15
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	56
24	TUKANG CUKUR	10
25	TUKANG LISTRIK	9
26	TUKANG BATU	101
27	TUKANG KAYU	191
28	TUKANG SOL SEPATU	3
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	27



30	TUKANG JAHIT	58
31	TUKANG GIGI	2
32	PENATA RIAS	8
33	PENATA BUSANA	3
34	PENATA RAMBUT	8
35	MEKANIK	132
36	SENIMAN	9
37	TABIB	1
38	PARAJI	6
39	PERANCANG BUSANA	1
40	PENTERJEMAH	0
41	IMAM MASJID	15
42	PENDETA	188
43	PASTOR	3
44	WARTAWAN	17
45	USTADZ/MUBALIGH	17
46	JURU MASAK	14
49	ANGGOTA DPD RI	1
56	GUBERNUR	1
57	WAKIL GUBERNUR	1
58	BUPATI	1
59	WAKIL BUPATI	1
62	ANGGOTA DPRD PROP.	4
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	10
64	DOSEN	52
65	GURU	1.009
67	PENGACARA	11
68	NOTARIS	14
69	ARSITEK	7
71	KONSULTAN	29
72	DOKTER	76
73	BIDAN	140
74	PERAWAT	252
75	APOTEKER	34
77	PENYIAR TELEVISI	1
78	PENYIAR RADIO	1
79	PELAUT	39
81	SOPIR	432
83	PARANORMAL	1
84	PEDAGANG	431
85	PERANGKAT DESA	199
86	KEPALA DESA	17
87	BIARAWAN/BIARAWATI	6
88	WIRASWASTA	7.894
89	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA	11
94	TENAGA TATA USAHA	1
95	OPERATOR	1
96	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0
97	TEKNISI	2
99	PEKERJAAN LAINNYA	62

Tabel. 4.4 diatas menunjukkan penduduk yang bekerja berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan dan tercatat di administrasi kependudukannya.

Jika merujuk tabel di atas juga terlihat bahwa sektor swasta banyak memberikan lapangan kerja dan sektor wiraswasta merupakan salah satu pilihan utama bagi penduduk untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Begitu pula sektor pertanian dan perikanan masih memberikan peluang pekerjaan yang banyak dan kedepan dapat lebih dimaksimalkan dengan melihat masih besarnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber penghasilan bagi penduduk Kabupaten Bulungan. Selain itu angka Pelajar / Mahasiswa sebanyak 19.257 jiwa (13%) merupakan peluang dan tantangan bagi pemerintah untuk mengembangkan menjadi sumber daya manusia yang dinamis, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga kelak akan membantu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bulungan.

2. Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran)

Berikut ini disajikan data perkiraan pengangguran berdasarkan hitungan selisih penduduk Belum / Tidak Bekerja dengan penduduk prasekolah 0-6 tahun, penduduk usia 7 tahun keatas dianggap memiliki pekerjaan atau berstatus sebagai Pelajar / Mahasiswa. Hasil estimasi angka pengangguran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5: Jumlah Angka Pengangguran/Tidak Bekerja

KECAMATAN	TIDAK BEKERJA		BEKERJA		ANGKATAN KERJA
	JML	%	JML	%	
TANJUNG PALAS	2.357	29,11	5.740	70,89	8.097
TANJUNG PALAS BARAT	1.187	37,84	1.950	62,16	3.137
TANJUNG PALAS UTARA	1.482	30,57	3.366	69,43	4.848
TANJUNG PALAS TIMUR	3.063	33,32	6.130	66,68	9.193
TANJUNG SELOR	7.672	25,76	22.110	74,24	29.782
TANJUNG PALAS TENGAH	1.318	25,83	3.784	74,17	5.102
PESO	719	34,42	1.370	65,58	2.089
PESO HILIR	619	32,32	1.296	67,68	1.915
SEKATAK	2.026	40,75	2.946	59,25	4.972
BUNYU	1.707	36,61	2.956	63,39	4.663
JUMLAH	22.150	30,01	51.648	69,99	73.798

Tabel 4.5 menunjukkan angka Belum / Tidak bekerja di Kabupaten Bulungan sebesar 22.150 jiwa atau sebesar 30,05 %. Dari tabel tersebut angka pengangguran tertinggi berada di Kecamatan Sekatak sebesar 40,75 % jiwa diikuti Tanjung Palas

Barat yakni 37,84 %. Hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Bulungan untuk menyediakan sarana dan prasarana pelatihan kerja serta meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh keterampilan kerja.

3. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk berumur 0 hingga 14 tahun, ditambah jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas, kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 15 hingga 64 tahun. Dalam bahasa Inggris, rasio ketergantungan dikenal dengan istilah *dependency ratio*. Rasio ketergantungan juga bisa diartikan sebagai ukuran demografi dari rasio jumlah tanggungan terhadap total penduduk angkatan kerja di suatu wilayah.

Dampak yang terjadi jika rasio ketergantungan di suatu daerah dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan usia angkatan kerja dapat memengaruhi tingkat produktivitas penduduk angkatan kerja.

Selain itu, daerah yang memiliki rasio ketergantungan tinggi akan sulit menjadi daerah maju, karena beban tanggungan terhadap penduduk yang tidak produktif juga tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang cenderung lebih rendah. wilayah tersebut juga mengalami kesulitan untuk maju. Karena tingginya angka beban tanggungan yang harus dihadapi usia produktif atau angkatan kerja.

Tabel 4.6: Jumlah Rasio Ketergantungan

WILAYAH	USIA MUDA	USIA TUA	USIA PRODUKTIF	Rasio Ketergantungan
TANJUNG PALAS	4.624	1.233	13.219	44,31
TANJUNG PALAS BARAT	1.658	486	4.897	43,78
TANJUNG PALAS UTARA	3.021	922	8.028	49,12
TANJUNG PALAS TIMUR	6.221	818	15.262	46,12
TANJUNG SELOR	17.984	2.587	47.266	43,52
TANJUNG PALAS TENGAH	3.188	639	8.471	45,18
PESO	952	318	3.116	40,76
PESO HILIR	962	326	2.917	44,15
SEKATAK	3.911	468	8.047	54,42
BUNYU	3.136	790	8.221	47,76
TOTAL	45.657	8.587	119.444	45,41

Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bulungan nilainya 45,41, yang artinya dalam 100 penduduk produktif, menanggung 45 jiwa penduduk yg tidak produktif.

Nilai tersebut masih cukup rendah yang berarti beban yang ditanggung penduduk produktif untuk menopang mereka yang non-produktif menjadi lebih ringan, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran.

C. Sosial

1. Angka Penyandang Cacat (Disabilitas)

Isu sosial berikutnya adalah disabilitas. Informasi tentang banyaknya penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan pemerintah daerah dalam memberikan program atau infrastruktur pelayanan publik yang ramah penyandang disabilitas / penyandang cacat, data penyandang cacat Kabupaten Bulungan disajikan pada halaman berikut :

Tabel 4.7: Angka Penyandang Cacat (Disabilitas)

NO	KECAMATAN	DISABILITAS						Jumlah
		DISABILITAS FISIK	DISABILITAS NETRA/ BUTA	DISABILITAS ITAS RUNGU /WICARA	DISABILITAS LITAS MENTA L/JIWA	DISABILITAS LITAS FISIK DAN MENTAL	DISABILITAS LITAS LAINNYA	
1	TANJUNG PALAS	12	4	6	24	6	6	58
2	TANJUNG PALAS BARAT	2	3	5	4	2	7	23
3	TANJUNG PALAS UTARA	10	3	6	5	1	5	30
4	TANJUNG PALAS TIMUR	9	3	7	4	1	6	30
5	TANJUNG SELOR	38	17	33	48	10	17	163
6	TANJUNG PALAS TENGAH	6	3	6	4	0	2	21
7	PESO	5	5	3	3	1	3	20
8	PESO HILIR	10	2	5	3	2	1	23
9	SEKATAK	8	3	1	3	0	10	25
10	BUNYU	4	2	8	12	1	1	28
	TOTAL	104	45	80	110	24	58	421

Jumlah penyandang cacat di Kabupaten Bulungan penduduk tahun 2025 tercatat 420 jiwa atau meningkat dari tahun 2024. Angka ini tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Bulungan Meskipun jumlahnya kecil, penduduk penyandang cacat tetap harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bulungan untuk tetap diberikan pelayanan sosial bagi mereka seperti pendidikan, kesehatan dan fasilitas layanan umum lainnya.

KEPEMILIKAN DOKUMEN

Dokumen kependudukan adalah kunci akses terhadap pelayanan publik yang disediakan pemerintah bagi seluruh warga negara. Sebagai warga negara kita wajib memiliki dokumen kependudukan seperti KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian. Dokumen kependudukan ini berkekuatan hukum mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain. Bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta memperkuat database kependudukan bagi peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

A. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istri, sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut.

Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dengan kepala keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua, di SIAK terbaru ada penambahan golongan darah dan status perkawinan tercatat atau belum tercatat.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat jumlah persentase kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Bulungan :

Tabel 5.1: Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	SUDAH MEMILIKI KK		BELUM MEMILIKI KK	
			N	%	N	%
1	TANJUNG PALAS	6.092	6.078	99,77	14	0,23
2	TANJUNG PALAS BARAT	2.221	2.212	99,59	9	0,41
3	TANJUNG PALAS UTARA	3.908	3.893	99,62	15	0,38
4	TANJUNG PALAS TIMUR	7.393	7.352	99,45	41	0,55
5	TANJUNG SELOR	22.137	22.031	99,52	106	0,48
6	TANJUNG PALAS TENGAH	3.840	3.829	99,71	11	0,29
7	PESO	1.316	1.312	99,70	4	0,30
8	PESO HILIR	1.325	1.323	99,85	2	0,15
9	SEKATAK	3.858	3.841	99,56	17	0,44
10	BUNYU	4.062	4.051	99,73	11	0,27
	JUMLAH	56.152	55.922	99,59	230	0,41

Tabel 5.1 menunjukkan jumlah keluarga dan jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga di Kabupaten Bulungan. Dari 56.152 jumlah keluarga yang memiliki KK adalah 55.922 atau sebesar 99,52 %. Sedangkan jumlah keluarga yang belum memiliki kartu keluarga sebanyak 230 atau sebesar 0,41 %.

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

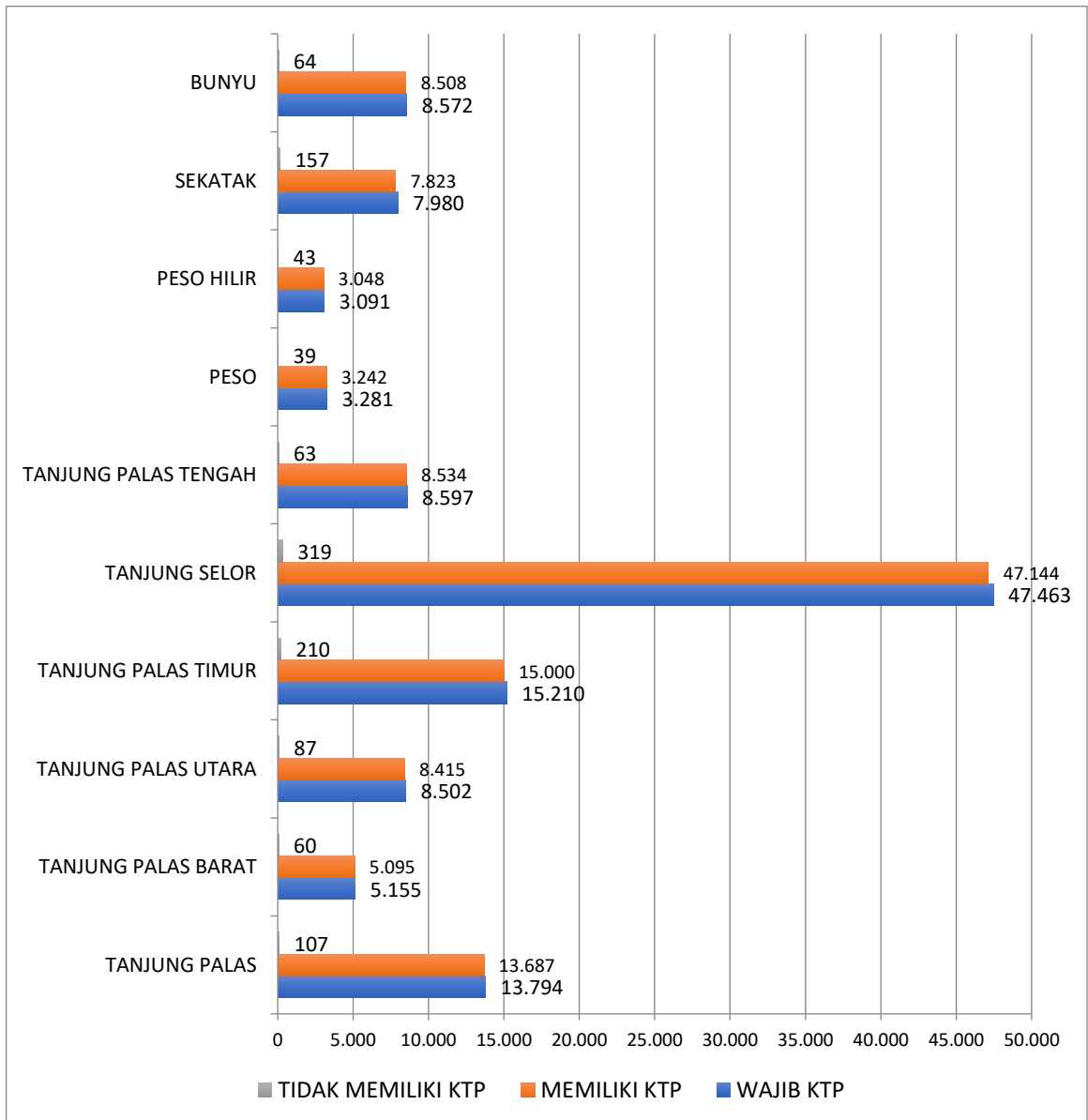
Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan pasal 63 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya, misalnya urusan perbankan, sertifikat tanah, perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Jumlah dan proporsi penduduk menurut kepemilikan KTP pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Kabupaten Bulungan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.2: Presentase Kepemilikan KTP-EI

no	KECAMATAN	WAJIB KTP	REKAM KTP	BELUM REKAM	%
1	TANJUNG PALAS	13.794	13.687	107	99,22
2	TANJUNG PALAS BARAT	5.155	5.095	60	98,84
3	TANJUNG PALAS UTARA	8.502	8.415	87	98,98
4	TANJUNG PALAS TIMUR	15.210	15.000	210	98,62
5	TANJUNG SELOR	47.463	47.144	319	99,33
6	TANJUNG PALAS TENGAH	8.597	8.534	63	99,27
7	PESO	3.281	3.242	39	98,81
8	PESO HILIR	3.091	3.048	43	98,61
9	SEKATAK	7.980	7.823	157	98,03
10	BUNYU	8.572	8.508	64	99,25
	JUMLAH	121.645	120.496	1.149	99,06

Tabel di atas menampilkan penduduk wajib KTP Kabupaten Bulungan yang telah melaksanakan perekaman KTP-EI. Terlihat bahwa dari 121.645 jiwa wajib KTP, sebanyak 120.496 jiwa telah melakukan perekaman atau 99,06 %. Sejalan dengan pelaksanaan program pemerintah, penduduk yang masih mempunyai KTP non Elektronik dirubah menjadi KTP Elektronik. Proses perekaman dan pencetakan KTP Elektronik ini terkadang terkendala oleh gangguan jaringan dan distribusi alat dan bahan seperti blangko, ribbon, film dan lain lain yang terbatas. Grafik jumlah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk ditampilkan sebagai berikut :

Grafik 5.1: Presentase Kepemilikan KTP-EI



C. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

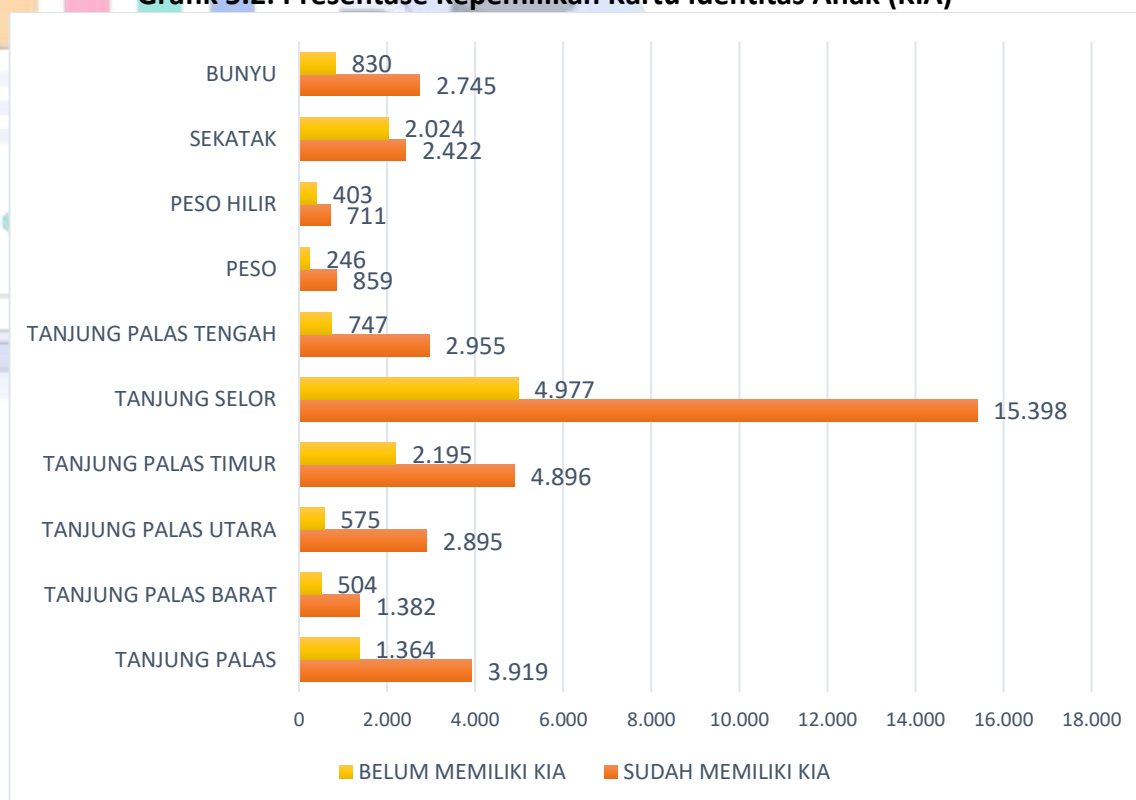
Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk anak-anak berusia 0-16 tahun atau belum menikah sebagai bukti perhatian pemerintah untuk memberikan dokumen kependudukan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa mengenal usia. Tabel berikut adalah data kepemilikan KIA se-Kabupaten Bulungan:

Tabel 5.3: Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

NO	KECAMATAN	JUMLAH (0-16) TAHUN	SUDAH MEMILIKI KIA	BELUM MEMILIKI KIA	PRESENTASE KEPEMILIKAN KIA
1	TANJUNG PALAS	5.283	3.919	1.364	74,18
2	TANJUNG PALAS BARAT	1.886	1.382	504	73,28
3	TANJUNG PALAS UTARA	3.470	2.895	575	83,43
4	TANJUNG PALAS TIMUR	7.091	4.896	2.195	69,05
5	TANJUNG SELOR	20.375	15.398	4.977	75,57
6	TANJUNG PALAS TENGAH	3.702	2.955	747	79,82
7	PESO	1.105	859	246	77,74
8	PESO HILIR	1.114	711	403	63,82
9	SEKATAK	4.446	2.422	2.024	54,48
10	BUNYU	3.575	2.745	830	76,78
	TOTAL	52.047	38.182	13.865	73,36

Dari tabel kepemilikan KIA Tertinggi adalah Kecamatan Tanjung Palas Utara memiliki persentase terbesar 83,43 %, Kemudian diikuti oleh Kecamatan Tanjung Palas Tengah 79,82 %, Kemudian Kecamatan yang lainnya yang Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 5.2: Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)



D. Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal.

1. Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Saat ini untuk mempermudah masyarakat memiliki atau membuat Akta Kelahiran jika masyarakat tidak memiliki dokumen pendukung (surat kelahiran, dll) dapat mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk mendapatkannya. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya, data kepemilikan akta kelahiran disajikan sebagai berikut :

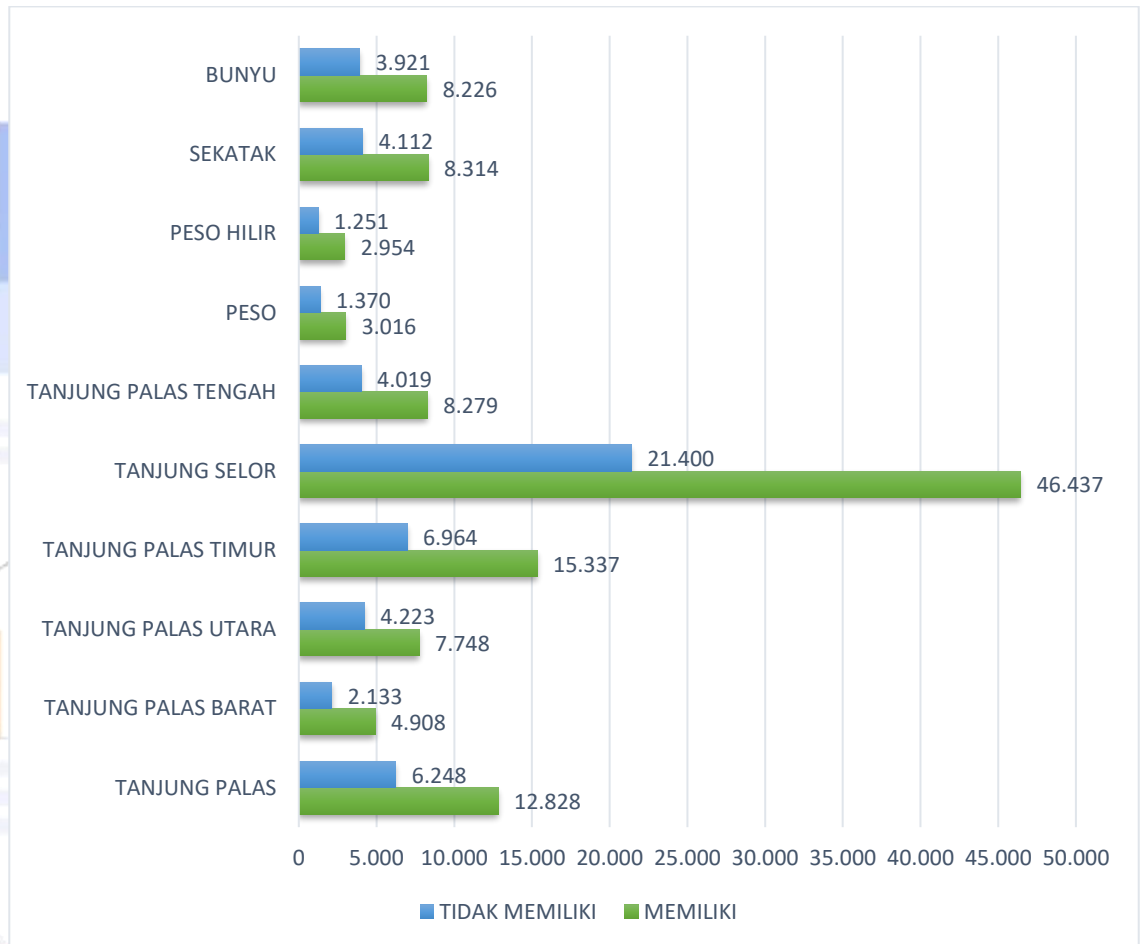
Tabel 5.4: Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	BELUM MEMILIKI	MEMILIKI	PERSEN TASE (%)
1	TANJUNG PALAS	19.076	12.828	6.248	67,25
2	TANJUNG PALAS BARAT	7.041	4.908	2.133	69,71
3	TANJUNG PALAS UTARA	11.971	7.748	4.223	64,72
4	TANJUNG PALAS TIMUR	22.301	15.337	6.964	68,77
5	TANJUNG SELOR	67.837	46.437	21.400	68,45
6	TANJUNG PALAS TENGAH	12.298	8.279	4.019	67,32
7	PESO	4.386	3.016	1.370	68,76
8	PESO HILIR	4.205	2.954	1.251	70,25
9	SEKATAK	12.426	8.314	4.112	66,91
10	BUNYU	12.147	8.226	3.921	67,72
	JUMLAH	173.688	118.047	55.641	67,96

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Bulungan yang memiliki akta kelahiran sebesar 67,96 persen sebesar 118.047 jiwa, sedangkan sebesar 55.641 jiwa atau 32,04 persen penduduk belum

mempunyai akta kelahiran. Bila dilihat berdasarkan wilayah maka kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Peso Hilir adalah yang tertinggi. Pada grafik di bawah ini dapat dilihat jumlah kepemilikan akta kelahiran di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan:

Grafik 5.3: Kepemilikan Akta Kelahiran



Data kepemilikan akta kelahiran anak umur 0 – 18 tahun yang menjadi salah satu prioritas kepemilikan dokumen kependudukan seperti disajikan tabel berikut :

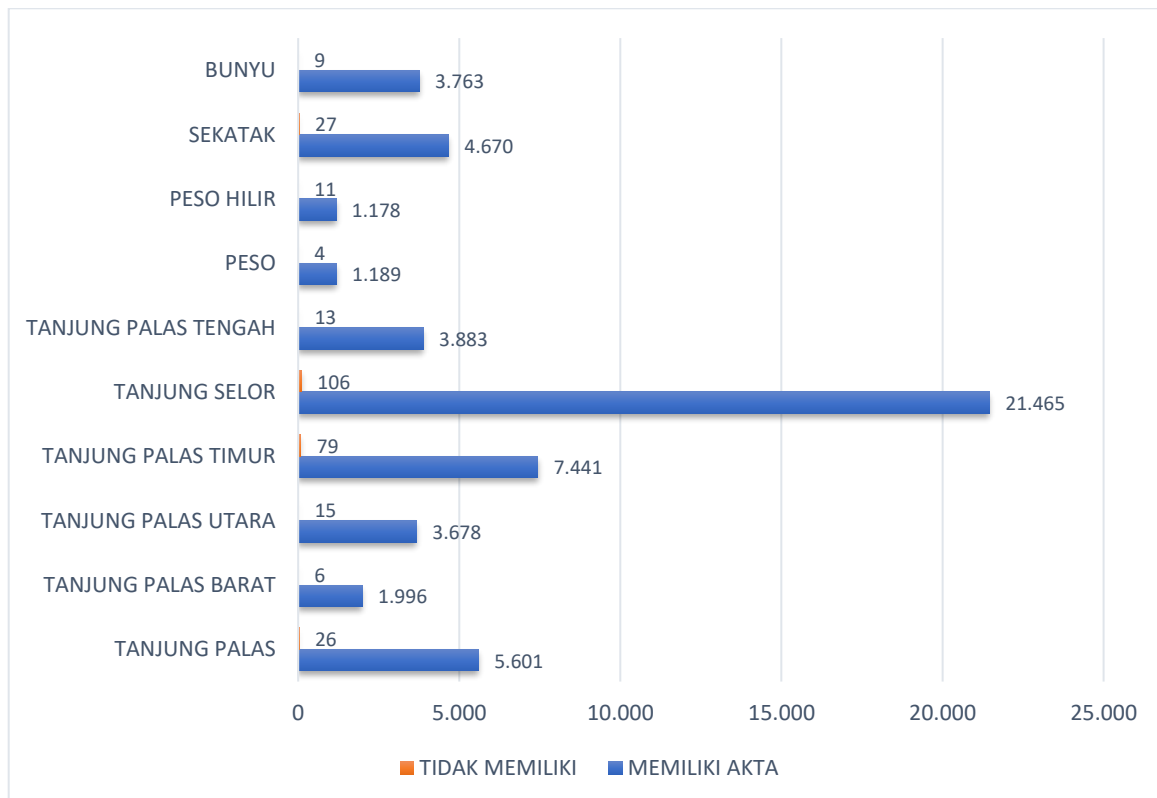
Tabel 5.5: Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18) Tahun

NO	KECAMATAN	JUMLAH USIA 0-18 THN	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSENTASE (%)
1	TANJUNG PALAS	5.627	5.601	26	99,54
2	TANJUNG PALAS BARAT	2.002	1.996	6	99,7
3	TANJUNG PALAS UTARA	3.693	3.678	15	99,59

4	TANJUNG PALAS TIMUR	7.520	7.441	79	98,95
5	TANJUNG SELOR	21.571	21.465	106	99,51
6	TANJUNG PALAS TENGAH	3.896	3.883	13	99,67
7	PESO	1.193	1.189	4	99,66
8	PESO HILIR	1.189	1.178	11	99,07
9	SEKATAK	4.697	4.670	27	99,43
10	BUNYU	3.772	3.763	9	99,76
TOTAL		55.160	54.864	296	99,46

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 bahwa Target tahun 2025 Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 tahun adalah 100% maka dari tabel di atas untuk Kabupaten Bulungan masih sekitar 99,46 %. Perlu upaya-upaya atau terobosan untuk meningkatkan pencapaian ini dengan pemutakhiran atau peginputan data akta kelahiran bagi penduduk yang sudah memiliki tapi belum terinput dalam database serta kemudahan-kemudahan bagi penduduk yang akan mengurus akta kelahiran. Grafik jumlah kepemilikan akta kelahiran anak umur 0-18 disampaikan sebagai berikut:

Grafik 5.4: Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18) Tahun



2. Akta Perkawinan

Akta perkawinan / nikah merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Tabel dibawah ini menyajikan kepemilikan akta perkawinan :

Tabel 5.6: Presentase Kepemilikan Akta Perkawinan

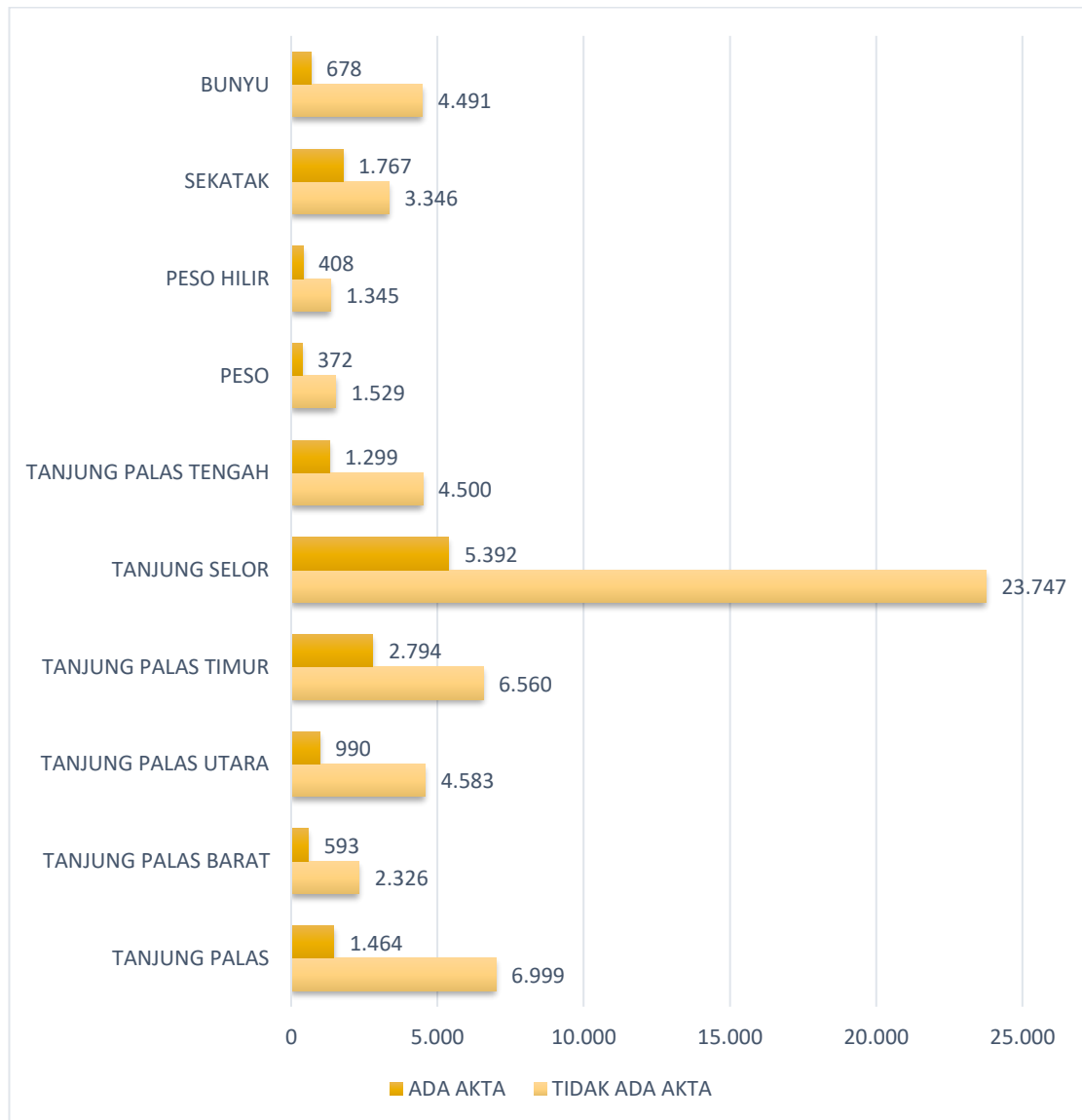
NO	KECAMATAN	JUMLAH	MEMILIKI AKTA	BELUM MEMILIKI AKTA	PERSENTASE (%)
1	TANJUNG PALAS	8.463	6.999	1.464	82,70
2	TANJUNG PALAS BARAT	2.919	2.326	593	79,68
3	TANJUNG PALAS UTARA	5.573	4.583	990	82,24
4	TANJUNG PALAS TIMUR	9.354	6.560	2.794	70,13
5	TANJUNG SELOR	29.139	23.747	5.392	81,50
6	TANJUNG PALAS TENGAH	5.799	4.500	1.299	77,60
7	PESO	1.901	1.529	372	80,43
8	PESO HILIR	1.753	1.345	408	76,73
9	SEKATAK	5.113	3.346	1.767	65,44
10	BUNYU	5.169	4.491	678	86,88
	TOTAL	75.183	59.426	15.757	79,04

Tabel 5.6 menyajikan perbandingan penduduk berstatus kawin terhadap kepemilikan akta perkawinan. Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan yang berstatus kawin sebanyak 75.183 jiwa, terdapat 59.426 Jiwa (79,04%) yang memiliki akta perkawinan dan 15.757 (20,96%) jiwa yang tidak memiliki akta perkawinan. Masih banyaknya pasangan yang belum memiliki akta pernikahan terjadi karena banyak penduduk yang melakukan perkawinan secara agama atau adat saja tetapi tidak tercatat secara administrasi kependudukan, sehingga perkawinan ini belum diakui secara hukum negara.

Jika dilihat per Kecamatan, dan dibandingkan dengan data pada periode sebelumnya, Bunyu menjadi Kecamatan yang tingkat kepemilikan akta perkawinannya tertinggi 86,88%, Kecamatan sekatak dengan 65,44%, merupakan Kecamatan yang paling kecil hal ini dapat disebabkan karena wilayah pusat pemerintahan yang sulit dijangkau dan jauh di pedalaman

sehingga penduduk lebih banyak belum mencatatkan perkawinannya baik yang secara agama atau adat. Adapun Grafik jumlah kepemilikan akta perkawinan disampaikan sebagai berikut :

Grafik 5.5: Kepemilikan Akta Perkawinan



3. Akta Perceraian

Pasangan yang telah berpisah dan berstatus cerai hidup wajib memiliki akta perceraian. Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah dan persentase penduduk berstatus cerai hidup yang memiliki akta cerai disetiap Kecamatan se Kabupaten Bulungan:

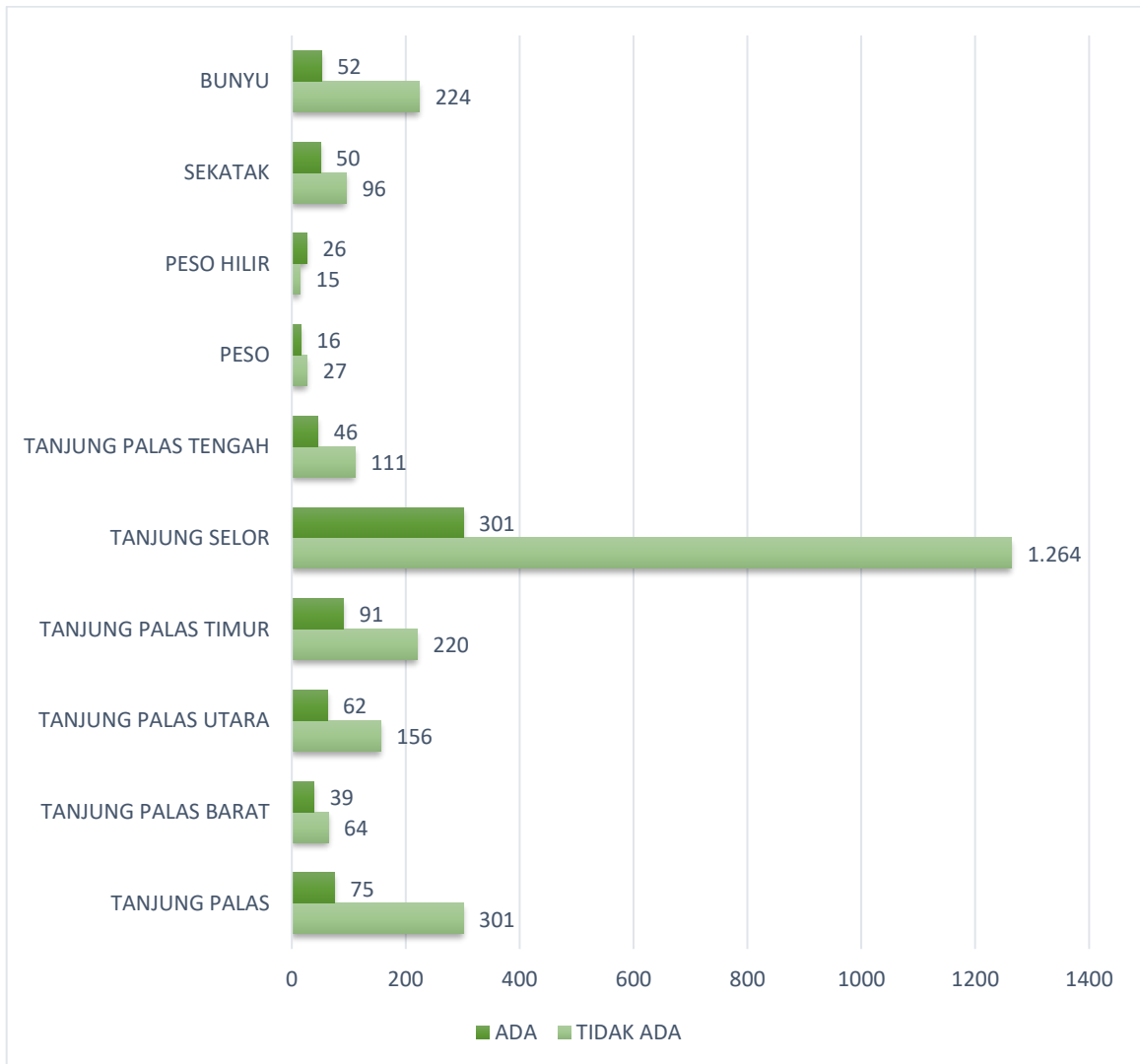
Tabel 5.7: Presentase Kepemilikan Akta Perceraian

NO	KECAMATAN	JUMLAH CERAI	MEMILIKI	BLM MEMILIKI	PERSENTASE (%)
1	TANJUNG PALAS	376	301	75	80,05
2	TANJUNG PALAS BARAT	103	64	39	62,14
3	TANJUNG PALAS UTARA	218	156	62	71,56
4	TANJUNG PALAS TIMUR	311	220	91	70,74
5	TANJUNG SELOR	1.565	1.264	301	80,77
6	TANJUNG PALAS TENGAH	157	111	46	70,70
7	PESO	43	27	16	62,79
8	PESO HILIR	41	15	26	36,59
9	SEKATAK	146	96	50	65,75
10	BUNYU	276	224	52	81,16
	TOTAL	3.236	2.478	758	76,58

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa penduduk berstatus cerai hidup yang memiliki akta perceraian sebesar 2.478 jiwa atau 76,58% dari penduduk yang berstatus cerai hidup dan yang belum memiliki akta perceraian sebanyak 758 jiwa atau 23,42%. Persentase penduduk cerai hidup yang tidak memiliki akta perceraian masih sangat tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh masyarakat yang belum melaporkan perceraian. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah kabupaten/kota dalam merencanakan suatu program kegiatan untuk sosialisasi dan penyuluhan akan pentingnya akta perceraian maupun dokumen kependudukan lainnya. Akta perceraian dengan presentase kepemilikan paling tinggi yaitu di Kecamatan Tanjung Selor.

Apabila data di atas disajikan dalam bentuk grafik, maka akan nampak seperti di bawah ini :

Grafik 5.6: Presentase Kepemilikan Akta Perceraian



4. Akta Kematian

Akta Kematian merupakan dokumen yang diterbitkan bagi warga negara yang telah meninggal atas laporan dari ahli waris atau pihak lainnya. Hal ini terkait dengan status hukum seseorang, baik itu hukum privat maupun hukum publik. Jika pelaporan akta kematian ini berjalan baik maka akan mendukung pendataan penduduk yang lebih tepat dan akurat dari sisi jumlah penduduk agar biodata yang bersangkutan bisa dihapus dari database sehingga tidak mempengaruhi atau muncul masalah dalam hal jumlah penduduk.

Berikut ini data jumlah kepemilikan akta kematian di Kecamatan di Kabupaten Bulungan :

Tabel 5.8: Presentase Kepemilikan Akta Kematian

No	WILAYAH	TERBIT AKTA	BATAL AKTA	MENINGGAL
1	TANJUNG PALAS	1.014	2	1.012
2	TANJUNG PALAS BARAT	479	1	478
3	TANJUNG PALAS UTARA	703	0	703
4	TANJUNG PALAS TIMUR	788	4	784
5	TANJUNG SELOR	2.770	7	2.763
6	TANJUNG PALAS TENGAH	492	3	489
7	PESO	238	1	237
8	PESO HILIR	269	1	268
9	SEKATAK	509	1	508
10	BUNYU	728	1	727
	TOTAL	9.435	31	9.404

Dilihat dari tabel di atas, terdapat 9.404 kematian yang dilaporkan dan 9.435 penerbitan akta kematian. Kecamatan Tanjung Selor jumlah akta kematiannya yang paling besar dikarenakan jumlah kematian yang dilaporkan juga besar, sedangkan jumlah akta kematian adalah akta kematian yang dicetak sampai dengan tahun 2025, sehingga penerbitan akta kematian lebih sedikit daripada jumlah kematian penduduk yang dilaporkan. Jadi, jumlah akta kematian ini bisa berasal dari laporan kematian sebelum tahun 2025 dan baru diterbitkan akta kematiannya pada tahun 2025. Penerbitan akta kematian di Kecamatan Tanjung Selor merupakan yang tertinggi di Kabupaten Bulungan hal ini dapat dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan pembuatan akta kematian sudah tumbuh dan adanya kerjasama dengan instansi terkait lainnya baik di kelurahan maupun kecamatan dan / atau instansi yang mengurus pemakaman.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bulungan Tahun 2026 ini memuat data kependudukan Kabupaten Bulungan Tahun 2025 yang bersumber dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Buku ini kami harapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan / atau swasta maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan serta bermanfaat sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bulungan.

Untuk mendukung penyusunan dan penyajian Profil Perkembangan Kependudukan tahun berikutnya, diperlukan usaha dan dukungan stake holder yang terkait khususnya perbaikan data atau pemutakhiran data kependudukan setiap periode sehingga penyajian tahun yang akan datang lebih baik dan akurat.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan mendatang sangat dibutuhkan, baik dari pengguna data maupun pemerhati masalah kependudukan. Demikian dan Terimakasih.